

GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG
(STUDI KASUS DESA KEPUH KECAMATAN LIMPUNG
KABUPATEN BATANG)
SKRIPSI PROGRAM SARJANA (S1) JURUSAN ILMU
POLITIK



OLEH:
SYAHRUL UMAM
(18060160980)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik UIN walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek akademis dan administrative dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Syahrul Umam

Nim : 1806016098

Jurusan : Ilmu Politik

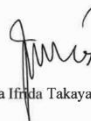
Judul : GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG (STUDI KASUS
DESA KEPUH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2025

Pembimbing I



Tika Ifrida Takayasa, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG

(Studi Kasus Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Disusun Oleh :

Syahrul Umam

(1806016098)

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UIN

Walisongo Semarang pada tanggal 27 Juni 2025 dan dinyatakan

LULUS.

Susunan Dewan Penguji,



Takayasa, M.A.
NIP. 198811152019032018

Sekretaris

Masrohatus, M.Si.

NIP. 198806212018012001

Penguji

M. Nuqir Bariklana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

Pembimbing

Tika Ifrida Takayasa, M.A.
NIP. 198811152019032018

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2025



Syahrul Umam

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat,taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG (STUDI KASUS DESA KEPUH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW,teladan umat manusia dalam perjuangan dan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang Sarjana (S1) pada program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama proses penulisan, penulis banyak memperoleh bantuan,arahan,dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar,M.Ag Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. M. Nuqlir Bariklana, M.Si Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang
4. Masrohatun, M.Si Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang
5. Tika Ifrida Takayasa, M.A. Selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen pengajar serta staf administrasi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali dengan berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu yang selalu memberikan segala dukungan baik dari segi moral dan material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Bapak Kepala Desa Kepuh serta Seluruh Jajaran dan Warga Desa Kepuh yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Zulqotun Amalina terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman S1 Ilmu Politik-C UIN Walisongo Semarang angkatan 2018 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Teman seperjuangan terkhusus Ivan, Ulil, Akda, Fayaz, dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
12. Sedulur-sedulur Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) yang sudah memberikan saya kesempatan berproses dan belajar berorganisasi dalam masa perkuliahan. Sekaligus menjadi wadah berkumpul mahasiswa Batang yang berkuliah di Uin Walisongo Semarang.
13. Teman-teman kontrakan mulai dari Walet sampai Umah Usluk yang selalu mendukung dan bertukar pikiran sehingga membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang terhebat dalam hidup saya, Ibuku Istiqomah dan Bapaku Abdurrahman, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk Almamater hijau kebanggaanku.

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti kau ceritakan”

(Boy Chandra)

ABSTRAK

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena merusak integritas proses pemilu dan bisa menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas atau tidak mewakili kehendak rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan politik uang melalui inisiatif Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh. Keberhasilan masyarakat Desa Kemiri Barat dalam mengawal pemilihan kepala desa yang adil, bersih, dan jujur menjadi latar belakang utama pemilihan desa ini sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat dalam mendukung implementasi Gerakan Desa Anti Politik Uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengacu pada teori Gerakan social baru dan teori mobilisasi sumber daya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Gerakan APU berhasil mengurangi secara signifikan insetif dan praktik vote buying pada pilkades 2019 serta pemilu 2024, ditandai nihilnya laporan pelanggaran uang di TPS Desa Kepuh; (2) keberhasilan ditopang oleh mobilisasi sumber daya local-modal social berbasis jaringan – serta amplifikasi frame nilai agama dan budaya gotong royong yang mengstigmasasi politik uang sebagai perusak marwah desa; (3) Dukungan structural Bawaslu bersifat fasilitatif menyediakan materi kampanye, kanal aduan, dan spanduk edukatif tanpa mendominasi agenda warga, sehingga menjaga karakter bottom up gerakan; (4) Tantangan utama berupa keterbatasan dana operasional dan regenerasi relawan muda, namun diatasi melalui iuran sukarela dan kaderisasi kader karang taruna.

Kata Kunci : Politik uang, Gerakan, Mobilisasi, Desa, Bawaslu

ABSTRACT

Vote buying is the practice of offering money or goods to voters to influence their choices in elections. This practice poses a significant threat to democracy as it undermines the integrity of the electoral process and can result in the election of leaders who are neither competent nor representative of the people's will.

This study aims to analyze efforts to prevent vote buying through the initiative of the Anti-Vote Buying Village Movement in Kepuh Village. The success of the community in Kemiri Barat Village in overseeing fair, clean, and honest village head elections serves as the primary reason for selecting this village as the research subject. Additionally, this research seeks to identify the roles of the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the community in supporting the implementation of the Anti-Vote Buying Village Movement.

Employing a qualitative research method with a case study approach, this study refers to the theory of New Social Movements and Resource Mobilization Theory. Data sources include primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted using qualitative analytical techniques.

The results of the study show : (1) The APU movement succeeded in significantly reducing the incentives and practices of vote buying in the 2019 Village Head election and the 2024 election, marked zero reports of money violations at the kepuh village TPS; (2) Success was supported by the mobilization of local resources-social capital based on RT/RW networks, youth group,pkk, and religious study networks-as well as the amplification of the frame of religious values and mutual cooperation culture that stigmatizes money politic as destroying village dignity; (3) Bawaslu structural support was facilitative providing campaign materials, complaint channel, and educational banner without dominating the resident agenda, thus maintaining the bottom-up character of the movement; (4) The main challenge were limited operational and regeneration of young volunteers.

Keywords : *Vote buying, Movement, Mobilization, Village, Bawaslu*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II.....	35
KERANGKA TEORI.....	35
A. Gerakan sosial Baru (New Social Movement)	35
B. Teori Mobilisasi Sumber Daya.....	41
C. Teori Framing Sosial	50
BAB III.....	72
Gambaran Desa Anti Politik Uang	72
Di Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ..	72

A.	Sejarah Desa Kepuh	72
B.	Visi Dan Misi Pemerintah Desa Kepuh	74
C.	Demografi Desa Kepuh	76
D.	Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi Desa Kepuh	78
BAB IV		81
PEMBAHASAN		81
A.	Sejarah Desa Kepuh Sebagai Desa Anti Politik Uang	81
B.	Tahapan Gerakan Sosial Anti Politik Uang.....	83
C.	Dinamika Internal dan Tantangan Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh.....	90
BAB V		110
GERAKAN DAN STRATEGI.....		110
A.	Gerakan Desa Apu dalam Memobilisasi Sumberdaya	110
B.	Strategi Framing Gerakan Anti Politik Uang Desa Kepuh	123
C.	Peran Bawaslu Dalam Gerakan Anti Politik Uang Desa Kepuh	130
BAB VI		135
PENUTUP		135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		141
RIWAYAT HIDUP		149
A.	Identitas Diri.....	149
B.	Riwayat Pendidikan	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem ini, demokrasi dipahami sebagai mekanisme pemerintahan yang bertujuan untuk menjamin kedaulatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Dalam praktiknya, pemilu menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili mereka dalam pemerintahan.

Pelaksanaan demokrasi melibatkan peran aktif pemerintah dan memungkinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Salah satu perwujudan konkret dari prinsip demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum, yang menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilu memiliki peran yang sangat penting, karena mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

menentukan pihak-pihak yang akan memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan (Lina Ulfa Fitriani, 2018).

Politik uang merupakan fenomena yang selalu ramai diperbincangkan dalam setiap momen pemilihan umum. Secara umum, politik uang merupakan bentuk pemberian berupa uang atau barang kepada calon pemilih agar orang tersebut memilih kandidat yang sudah ditentukan. Politik uang menjadi suatu penyakit yang sudah membudaya pada setiap dilaksanakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan, pelaksanaan pemilihan umum juga menggambarkan indikator bagaimana jalannya pesta demokrasi di negara demokratis.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019).

Dalam proses berjalannya demokrasi, peran dari pemilu sebagai instrument terlaksana nya demokrasi mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dimana semakin berkualitasnya pemilu maka akan semakin baik

pula kualitas demokrasi. Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi suatu Negara, karena di dalamnya rakyat bisa berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya (Mauludi, S. (2018).

System demokrasi memberikan ruang bagi setiap individu yang memiliki niat dan kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, terutama dalam mencalonkan diri guna menduduki posisi strategis di berbagai lembaga di seluruh wilayah negara. Kondisi ini memicu munculnya berbagai strategi untuk meraih dukungan masyarakat, salah satunya melalui praktik politik uang (*money politic*) yang biasanya terjadi menjelang hari pemungutan suara, baik pada malam sebelum maupun pagi hari saat pemilu berlangsung (Simatupang & Subekhan, 2018).

Pemilu sebagai instrumen demokrasi rakyat desa, pemilihan umum (*pemilu*) merupakan fondasi utama demokrasi, terutama di tingkat desa di mana interaksi langsung antara calon dan warga terasa paling intens. Menurut Mauludi (2018), kualitas pemilu secara langsung mencerminkan kualitas demokrasi yang berlaku, semakin profesional dan bersih pelaksanaannya, semakin kokoh legitimasi demokrasi itu sendiri. Suatu negara dinilai demokratis saat warga memiliki akses nyata dalam proses memilih pemerintahan secara bebas dan adil (Mauludi,

2018).

Di level lokal desa, pemilu menjadi ruang vital mengekspresikan kedaulatan rakyat, sesuai konsep hak politik yang dijamin oleh UUD 1945 (Pasal 28E ayat 2). Namun, realitas politik di desa sering terdistorsi oleh praktik *money politics* praktik pemberian uang atau barang sebagai imbalan suara. Simatupang & Subekhan (2018) mengungkapkan bahwa budaya ini muncul massif dalam periode kampanye, terutama menjelang waktu pemungutan suara. Hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem politik komunitas desa, di mana pendekatan personal lebih dominan daripada program atau visi jangka panjang.

Politik uang berdampak serius pada mutu demokrasi dapat mengakibatkan distorsi representasi rakyat bahwa calon menang karena modal finansial, bukan aspirasi rakyat. Hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Menurunkan partisipasi meski angka partisipasi meningkat, itu bersifat *pseudo-participation*, bukan karena kesadaran politik, melainkan karena insentif materiil. Kemudian, mendorong korupsi berakar, karena calon sudah "balik modal" sejak sebelum terpilih.

Beberapa faktor struktural menjelaskan kerentanan desa terhadap *money politics*. Pertama,

rendahnya pendidikan politik bahwa warga kurang kritis terhadap visi misi calon (Trias Pahlevi 2023). Kedua, lemahnya ekonomi warga bahwa spektrum kebutuhan hidup membuat mereka lebih mudah dipengaruhi insentif langsung (Pratama dkk., 2023). Ketiga, keterbatasan pengawasan bahwa Panitia atau Bawaslu desa minim tenaga dan sarana pengawasan antisipatif. Keempat, nilai budaya politisi bahwa identitas komunal yang kuat, seperti solidaritas keluarga atau patronase diasimilasikan dalam strategi politik uang .

Untuk memperkaya gerakan demokrasi desa dan menjadikan desa lebih resilient terhadap distorsi demokrasi, berikut beberapa gagasan inovatif: Pertama model demokrasi deliberatif berbasis komunitas, mengembangkan forum warga yang memprioritaskan diskursus bersama sebelum memilih, dengan moderator (bisa dosen/aktivis) untuk merawat publik deliberatif jour. Kedua, teknologi informasi demokratis, seperti aplikasi pelaporan anonim insiden *money politics*, dan sistem peringatan dini melalui pesan komunitas. Ketiga, penguatan ekologi sanksi sosial, di mana kampanye anti-politik uang didukung oleh aliansi tokoh agama, pemuda, dan kelompok Perempuan yang memetakan desa sebagai zona moral dan etika politik. Keempat, program simbiosis pendidikan politik dengan literasi ekonomi, agar warga

tidak hanya meleak politik, tetapi juga memiliki alternatif ekonomi produktif sehingga tak bergantung pada insentif materiil saat pemilu (Halili, 2009).

Pemilu adalah instrumen utama demokrasi rakyat desa, tetapi kualitas demokrasi desa sering tergerus oleh politik uang. Studi empiris menunjukkan bahwa praktik ini mengikis representasi, melemahkan integritas, dan membentuk partisipasi semu bersama dominasi modal. Untuk meredamnya, perlu diimplementasikan strategi berlapis seperti pendidikan politik komprehensif, pengawasan partisipatif, penegakan hukum, serta inovasi model demokrasi lokal yang berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang holistik dan modal partisipasi aktif komunitas, desa dapat menjadi benteng demokrasi sejati, ruang di mana rakyat benar-benar menjadi pemegang kedaulatan, bukan barang dagangan politik.

Politik uang atau dikenal dengan istilah money politic merujuk pada kondisi dimana uang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang sejatinya tidak pantas di perjualbelikan (Johnson, 2001). Dalam politik hal ini merupakan tindakan untuk mengarahkan suara ke salah satu calon maupun partai tertentu dengan maksud untuk memenangkan suatu pemilihan. Permasalahan itu yang membuat system pada pemilihan menjadi rusak, dimana sebelumnya pemilihan diharapkan

mampu untuk menghasilkan pemimpin dengan visi misi yang sesuai, malah terhalang oleh adanya politik uang.

Berlangsungnya praktik politik uang dalam pemilu tentu saja telah menciderai praktik demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi electoral. Berlangsungnya politik uang itu juga tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi pada tingkat pemilihan kepala desa pun praktik money politics tumbuh subur, karena dianggap sebagai sesuatu kewajaran dan masyarakat kurang peka terhadap dampaknya, mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi (Mahfud, 2003).

Gerakan Sosial Anti Politik Uang adalah gerakan sosial yang memiliki fokus dalam upaya menangani politik uang sebagai bentuk dari pendidikan politik. Isu politik uang termasuk dalam salah satu klaster isu kontemporer gerakan sosial baru yang mengakar kuat di masyarakat dari sekian banyak kemunculan Gerakan sosial kontemporer di dunia (Alina, 2022).

Gerakan sosial dicirikan oleh sifat kolektifnya, karena melibatkan kelompok individu yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan-gerakan ini terus-menerus berinteraksi dengan elit, lawan, dan otoritas.

Menurut definisi di atas, gerakan sosial dapat dilihat sebagai upaya kolaboratif yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama (Suharko, 2006). Dalam perspektif lain, gerakan sosial adalah salah satu studi ilmu politik yang menganalisis gerakan perlawanan yang mengungkapkan suatu isu atau wacana. Gerakan sosial berperan penting dalam mendorong terbentuknya sistem politik yang demokratis dan menjadi solusi atas stagnasi hubungan antara masyarakat sipil dan negara, terutama dalam mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara (Andi Haris, 2019).

Pembentukan desa anti politik uang menjadi solusi terbaru yang didasari pada kesepakatan dan komitmen dari masyarakat sendiri dan juga oleh para calon pemimpin. Pembentukan ini merupakan suatu bentuk gerakan pendidikan politik baru sebagai terobosan untuk meningkatkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks pengawasan, di Indonesia mempunyai lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai tugas sebagai pengawas dalam pemilu. Bawaslu juga memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk mendampingi dan mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat untuk bisa melakukan menjauhi praktik politik uang.

Bawaslu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 yang berisi tentang Pemilihan Umum, antara lain mendapatkan peran untuk melaksanakan pencegahan politik uang dan untuk mendorong masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan partisipatif. Amanat ini kemudian menjadikan dorongan Bawaslu untuk melakukan terobosan dalam pencegah sekaligus melakukan perlawanan terhadap politik uang melalui strategi pembentukan gerakan sosial berbasis desa atau kelurahan dengan nama Desa Anti Politik Uang pada setiap kabupaten maupun kota. Program tersebut kemudian diasumsikan akan melibatkan sebanyak-banyaknya bahkan diharapkan dapat mencakup seluruh elemen desa pada pengawasan partisipatif, sama halnya dengan gerakan desa anti politik uang yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

Praktik Gerakan Desa Anti Politik Uang telah banyak diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Gerakan ini dianggap telah bisa mengubah pandangan masyarakat pedesaan yang pada awalnya terbelenggu oleh adanya politik uang saat menjelang pemilihan umum. Tingkat politik uang pada desa-desa yang diresmikan sebagai desa anti politik uang menurun secara drastis dan pada beberapa desapolitik uang sudah cukup berkurang.

Desa kepuh menjadi desa ketiga yang mendeklarasikan pembentukan Desa anti Politik Uang

pada Tahun 2020. Deklarasi ini berbeda dari desa lainnya, karena gerakan tersebut sudah ada di masyarakat sebelum Bawaslu meresmikan Desa Kepuh sebagai desa anti politik uang.

Gerakan ini sebelumnya telah berhasil untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap politik uang saat pemilihan kepala desa Tahun 2019 sehingga kemudian diresmikan oleh Bawaslu sebagai Desa Anti Politik Uang. Walaupun desa Kepuh merupakan desa terkecil di Kecamatan Limpung dengan penduduk 1682 jiwa, semangat mereka dalam menolak Politik uang sangat kuat dengan dibuktikan sebagai percontohan desa lainnya (Bawaslu, 2021).

Penelitian ini memiliki perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan sejumlah studi terdahulu mengenai Gerakan Desa Anti Politik Uang. Jika sebagian besar penelitian menenankan pada peran bawaslu dalam membentuk gerakan melalui pendekatan struktural dan teknokratis. Penelitian ini justru menyoroti proses yang berasal dari inisiatif masyarakat secara organik di Desa Kepuh. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada fakta bahwa Gerakan Desa APU di Desa Kepuh sudah terbentuk dan berjalan sebelum adanya deklarasi resmi dari Bawaslu. Artinya, kesadaran kolektif warga dan tokoh masyarakat menjadi aktor utama dalam memulai dan mengorganisir

gerakan, bukan sebagai hasil intervensi dari institusi negara. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meninjau sisi normative dan deklaratif dari gerakan, tetapi juga mengkaji secara mendalam aspek Mobilisasi Sumber Daya, Peran kepemimpinan local, serta dinamika social yang membuat gerakan ini bertahan. Pendekatan ini menjadikan penelitian ini lebih kontekstual, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan politik yang bersih dan partisipatif dapat tumbuh dari bawah (Bottom-Up) dan bukan semata mata hasil kebijakan dari atas (Top-Down). Sehubungan dengan konteks tersebut, maka peneliti membuat penelitian yang berjudul “ ***GERAKAN DESA ANTIPOLITIK UANG (STUDIKASUS DESA KEPUH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)*** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana munculnya gerakan Anti Politik Uang di Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana Mobilisasi sumber daya gerakan dan strategi framing Gerakan Desa Anti Politik Uang di DesaKepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi strategi munculnya gerakan Anti Politik Uang di Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.
2. Mengidentifikasi mobilisasi sumber daya dan strategi framing gerakan anti politik uang di Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan serta literature dalam akademis dan menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gerakan anti politik uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan informasi serta wawasan kepada masarakat luas terkait dengan Gerakan anti politik uang yang muncul dari masarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak akademisi dan peneliti telah terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan desa anti politik uang sebagai gerakan sosial. Evaluasi literatur studi ini disusun menjadi dua bagian yang berbeda, khususnya berfokus pada topik anti-politik uang di pedesaan dan gerakan sosial.

1. Desa Anti Politik Uang

Studi ini telah dilakukan oleh banyak profesional, Fauzan Lazuardi (2020), Nanang Yulia Pranata (2019), Nabila Amrie Afina (2020), Agus Riwanto Dkk (2021), Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi (2020), Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso (2019). Adapun penelitian Fauzan Lazuardi, 2020 berjudul “Dinamika Gerakan Desa Anti Politik Uang” (studi kasus desa Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Karena kemampuan mereka untuk menawarkan wawasan yang substantif dan rumit tentang aktivitas anti politik uang di Desa Sadono Harjo, mereka dianggap sebagai sumber informasi yang mumpuni. Pencanangan kampanye desa anti politik uang di Desa Sadono Harjo berlangsung pada tanggal 16 Februari 2019. Lahirnya gerakan ini diprakarsai oleh masyarakat karena kedekatannya dengan fenomena pengaruh moneter dalam prosedur demokrasi elektoral, berupaya untuk mengatasi manifestasi asli dari politik moneter semacam itu. Proses pembentukan Kampung Politik Anti Uang diawali dengan pra-deklarasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan gerakan, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan sosialisasi oleh Bawaslu Bupati Sleman.

Studi lain dilakukan Nanang Yulia Pranata di tahun 2019 dengan judul “Strategi Mencegah Politik Uang Melalui Politik Uang Desa (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang di Murtigading Kecamatan Sandeng Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena dalam setting natural-social. Fokus utamanya adalah mendorong keterlibatan komunikatif yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang sedang diselidiki. Desa Murtigading merupakan inisiatif perdana percontohan anti politik uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini siap untuk menjadi ilustrasi paradigmatis tentang kontribusi signifikan yang dapat dilakukan oleh keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan kerangka kerja politik yang kuat. Rasa kebersamaan yang diperoleh masyarakat Desa Murtigading melalui pendidikan politik menjadi benteng utama mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Untuk mengubah kesadaran akan realitas budaya yang tidak sehat bahwa uang adalah segalanya, masyarakat desa Murti Gading mengadakan gerakan desa anti politik uang untuk menyanggahnya.

Kajian lainnya oleh Nabila Amrie Afina pada

tahun 2020 berjudul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Anti Politik Uang Di Desa Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui analisis ekspresi tertulis atau lisan individu dan tindakan yang diamati. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan disertasi ini melibatkan pemanfaatan penelitian lapangan. Tujuan kerja lapangan adalah untuk mengaburkan aspek kontekstual dari kondisi dan situasi yang ada, seiring dengan dinamika lingkungan, mempertahankan entitas sosial tertentu. Terbentuknya gerakan akar rumput yang dikenal sebagai gerakan desa anti politik uang memiliki arti penting dalam mewujudkan demokrasi, sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia, khususnya penduduk desa Tersobo. Diharapkan, melalui pembentukan gerakan ini, individu akan bertahan dalam dedikasinya untuk menghindari pendanaan politik dalam semua proses pemilu. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kebumen dalam gerakan tersebut.

Politik sosial anti uang desa hanya terfokus pada penawaran bantuan teknis di lapangan. Termasuk

keterlibatan dalam proses perencanaan, proses deklarasi, dan pematangan Bawaslu Desa anti politik uang Kabupaten Kebumen sejak awal. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kebumen melakukan sosialisasi tentang politik uang melalui penyelenggaraan acara berjejaring dan bincang-bincang dengan anggota komunitas desa anti politik uang yang berlangsung sekitar satu bulan sebelum diresmikan.

Penelitian lainnya oleh Agus Riwanto dkk pada tahun 2021 berjudul “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Cegah Pilkada yang Curang”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-hukum dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Analisis data teknis menggunakan metode normatif hukum utama dan model analisis interaktif. Peneliti akan melakukan analisis yuridis dan penelitian lapangan terhadap peraturan perundang-undangan. Model kebijakan anti politik uang, seperti rencana Bawaslu yang ditujukan untuk mencegah kecurangan pemilu dan memperkuat demokrasi lokal, memerlukan penelitian lebih lanjut tentang kelembagaan, undang-undang, standar operasional, dan evaluasi implementasi program

daerah anti politik uang. Ini bekerja dengan baik terutama dalam bentuk gerakan sosial, atau perlu diformalkan dalam bentuk undang-undang. Tingginya tingkat partisipasi dan penggunaan modal sosial masyarakat saat ini untuk menggerakkan gerakan sosial anti politik uang dapat menjadi model bagi KPU dalam mencegah kecurangan pemilu dan memperkuat demokrasi. Model ini dapat terwujud bila didukung oleh kerangka hukum yang tepat, contoh penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum dan dukungan keterlibatan masyarakat. Memerangi praktik politik uang adalah praktik umum untuk menciptakan demokrasi yang adil dan layak yang melayani kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit.

Kajian lain yang dilakukan oleh Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurobbi (2021) berjudul “Pendidikan Politik untuk Pencegahan politik uang melalui Gerakan Sosial Pedesaan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian. Artikel ini juga mengkaji langkah-langkah yang dilakukan oleh faksi anti-politik di Kampung Uang yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga mendalami keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu) yang fokus pada pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi fenomena jual beli suara dan maraknya politik uang di daerah. Esai ini juga akan meneliti efek dari pemindahan desa yang terkenal.

Studi ini mengkaji pendekatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap daerah pedesaan. Saat ini, ada kelangkaan yang mencolok dalam penyediaan pendidikan politik yang komprehensif bagi individu yang tinggal di daerah pedesaan. Konsekuensinya, Ikrar Desa APU muncul sebagai instrumen pilihan yang digunakan oleh tim desa untuk secara konsisten memberikan pendidikan politik yang konstruktif kepada masyarakat. Kemanjuran tindakan preventif ini telah diketahui dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari Departemen Ilmu Pemerintahan UMY pada tahun 2019. Berdasarkan data yang ada, terbukti bahwa 45% pemilih di masyarakat Desa APU memiliki pemahaman tentang sifat korupsi, politik uang, mengakui larangan agama dan moral. Selain itu, ditemukan bahwa proporsi yang signifikan, khususnya 50%, pemilih yang tinggal di Desa APU di Daerah Istimewa Yogyakarta, memilih caleg berdasarkan pertimbangan yang cermat dari manifesto pemilihan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa 32% pelamar terpilih dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial sehari-hari atau reputasi mereka terlibat secara sosial dalam komunitas masing-masing. Untuk dapat secara efektif menerapkan inisiatif anti-politik uang di pedesaan, perlu untuk memprioritaskan penyediaan pendidikan politik yang komprehensif. Upaya pendidikan ini sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga desa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

Kajian lain yang dilakukan oleh Kenlies Era Rosalina Marsudidan Sunarso (2019) berjudul “Revitalisasi Pendidikan Politik dengan Menciptakan Desa Politik Anti Uang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pendeskripsian variabel-variabel yang diteliti dan mencoba menawarkan informasi dan penjelasan. Pendidikan politik dengan terbentuknyadesa politik anti uang memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Penerapan aturan anti uang di desa yang melarang jual beli suara dalam pilkada mendorong munculnya pemimpin yang memiliki sifat jujur dan amanah. Penyelidikan diakhiri dengan berdirinya Desa

Anti Uang oleh Bawaslu, pendidikan politik alternatif berhasil membuat persepsi masyarakat pedesaan yang semula melekat pada kebijakan moneter menjadi lebih sadar dan dapat dipahami, sehingga dapat mereduksi praktik politik uang

2. Gerakan Sosial Baru

Penelitian ini telah sering dilakukan oleh berbagai pakar di antaranya, I Gede Bhakti Dkk (2017), Suharko (2006), Gabriel S. Opat dan Esrah D.N.A (2021), Febriyanti Valeria Roito Dkk (2022), Zulfan (2021). Adapun penelitian yang dilakukan I Gede Bhakti Venda Putra, Bandiyah, Piers Andreas Noak tahun 2017 berjudul “Gerakan Meme Sosial Politik di Media Sosial Instagram untuk Bali Tolak Reklamasi”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, desain deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan deskripsi dan analisis yang komprehensif tentang fenomena yang diselidiki. Kajian ini membahas proses merangkul berbagai kondisi, situasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan sedang dipelajari. Ini menekankan upaya untuk mengatributkan realitas ini sebagai fitur pada gambar permukaan, karakter, karakteristik, pola, tanda, atau deskripsi dari kondisi, benda, atau

fenomena tertentu. Lokasi penelitian yang ditunjuk untuk penelitian ini adalah Kota Denpasar/Kabupaten Badung yang terletak di Provinsi Bali.

Kajian teori framing dan teori propaganda dapat berfungsi sebagai alat yang berharga untuk menilai potensi mobilisasi dalam jejaring sosial Instagram dan penyebaran konten meme. Studi ini berpendapat bahwa Instagram dan meme memberikan pengaruh pada aspek fundamental dari gerakan sosial politik, yang bertujuan untuk memanfaatkan Instagram sebagai platform untuk menyebarkan jejaring sosial. Peran individu ini berdasarkan intelijen yang menunjukkan bahwa Forbali adalah organisasi yang didedikasikan untuk mempromosikan pelestarian lingkungan dengan meningkatkan kesadaran tentang proyek Reklamasi Teluk Benoa melalui penyebaran materi pendidikan, termasuk meme. Forbali secara konsisten menghadirkan konten di Instagram yang memastikan topik terkini dalam komunitas yang relevan. Meme Instagram "Menolak Reklamasi Bali" berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan pola pemanfaatan strategis yang diidentifikasi melalui penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Forbalists, yang secara independen menentukan signifikansinya.

Penelitian lain dilakukan Suharko tentang gerakan dan perlawanan sosial baru pada tahun 2006. Penelitian ini berjudul “Gerakan Sosial Baru di Indonesia Repertoar Gerakan Tani”. Suharko melakukan penyelidikan ilmiah terhadap manifestasi yang muncul dari mobilisasi sosial di Indonesia, khususnya memeriksa faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap perlawanan yang ditunjukkan oleh beragam kolektif pertanian di negara ini. Kelompok tani yang menjadi fokus investigasi terdiri dari Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FPNBP), Serikat Petani (SPP) Pasundan, dan Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU). Tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok petani tersebut adalah penyelesaian sengketa tanah, dimana diduga bahwa sengketa tersebut melibatkan perampasan tanah baik oleh pemerintah maupun swasta. Suharko memaparkan faktor-faktor kontekstual yang melingkupi isu tersebut berkaitan dengan teknik-teknik yang digunakan oleh kelompok tani individual dalam mencapai tujuan masing-masing. Studi ini menarik paralel antara penelitian yang diselidiki dan upaya ilmiah prospektif, dengan fokus pada manifestasi baru dari tindakan kolektif yang disebut perlawanan masyarakat sipil vis-à-vis otoritas negara.

Studi lain dilakukan oleh Gabriel S. Opat dan Esrah D.N.A. dilakukan. Benu Tahun 2021 berjudul “Gerakan Sosial Politik Masyarakat Menolak Ekskavasi Tambang C di Sungai Noemuti (Studi Tentang Perlawanan Sosial Politik di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)”. Gerakan sosial masyarakat desa Naiola merupakan aksi masyarakat yang menuntut penolakan Galian C di sungai Noemuti karena beberapa perusahaan masih belum memiliki izin pertambangan dan merusak beberapa sawah di masyarakat desa Naiola. yaitu Sawah Klæ. Luasnya lebih dari 2,45 hektar (HA) yang dimiliki oleh 10 keluarga. yang sawahnya tergerus banjir. Lahan yang tidak dapat digarap lebih dari 5,11 hektar (HA) pemilik 32 kepala keluarga. Dan lahan seluas 75 hektare (HA) milik 110 KK. Sawah Tainunus. Dari tahun 2014 hingga 2020 lahan sawah seluas 20 hektar (HA). Luas total sawah (rusak dan gagal panen) lebih dari 134,56 hektare (HA).

Penelitian juga dilakukan oleh Febriyanti Valeria Roito, Tiur Paulinawati dan Paulina Kurniawati Fau tahun 2022 berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)”.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, ditandai dengan pendekatan deskriptif didasarkan pada paradigma induktif. Gerakan sosial muncul sebagai manifestasi kekuasaan dalam masyarakat tertentu, dan perkembangannya dapat dibentuk oleh serangkaian kejadian di sekitarnya. Kajian ini mengkaji tentang manifestasi gerakan sosial melalui upaya masyarakat Pluit Putri dalam memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dan perjuangan mereka dalam pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa (BTB). Penolakan warga Pluit Putri berawal dari kekecewaan mereka terhadap kegagalan pihak pembangun untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan sekolah, yang mengakibatkan konsekuensi lingkungan yang merugikan. Selain itu, kekhawatiran telah dikemukakan oleh anggota masyarakat tentang aksesibilitas yang tidak memadai akibat pelaksanaan proyek pembangunan sekolah, yang menyebabkan potensi kemacetan lalu lintas dan gangguan kebisingan. Selain itu, oposisi yang ditunjukkan oleh penduduk berfungsi sebagai katalis untuk perubahan dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Konsekuensinya, penyesuaian tersebut menghasilkan modifikasi zona spasial yang didominasi oleh area

publik terbuka seperti taman dan lapangan basket, serta perluasan infrastruktur pendidikan. Penetapan kawasan yang ditunjuk untuk pembangunan fasilitas pendidikan difasilitasi sesuai dengan persyaratan zonasi. Namun, ternyata gerakan sosial Pluit Putri sejauh ini gagal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rencana pembangunan yang akan menyejahterakan penduduk setempat. Sebaliknya, gerakan tersebut secara tidak sengaja menghambat kemajuan, terutama karena tindakan para pesertanya. Pelaksanaan gerakan sosial bergantung pada identifikasi dan pemanfaatan jalur yang tepat, suatu hal yang memerlukan kajian komprehensif dari perspektif sektor pembangunan.

Penelitian lain dilakukan Zulfan pada tahun 2021 berjudul “Pengaruh Elit Pedesaan terhadap Gerakan Sosial di Indonesia Tahun 1818-1935”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan berbagai strategi pengumpulan data literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh elit pedesaan terhadap gerakan sosial di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan sosial dilakukan untuk kepentingan setiap kelompok di daerah, sehingga tidak ada kerjasama antar daerah gerakan. Sebagian besar

kekuatan gerakan berada di tangan para pemimpin. Ketika para pemimpin dihancurkan, aktivitas gerakan berakhir. Berdasarkan bentuk kegiatan tersebut, gerakan kerakyatan pada masa itu masih bersifat tradisional, tujuan gerakan tidak jelas. Cara yang mereka lakukan sehari-hari hanya sebatas mengharapkan sosok penyelamat atau Ratu Adil datang, yang mereka yakini akan memberi mereka kehidupan yang sejahtera. Dengan asumsi ini, gerakan sosial selalu didasarkan pada unsur keimanan, agama, dan magis. Maraknya gerakan-gerakan sosial menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada abad ke-19 dan ke-20 cukup aktif mengatasi dengan caranya sendiri kondisi-kondisi yang diciptakan oleh penjajahan Belanda.

Selain itu juga menunjukkan bahwa semangat dan kekuatan untuk menentang pemerintah Belanda masih ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, meskipun perlawanan besar bangsa telah diredam oleh pemerintah Belanda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai

pendekatan metodologis yang berusaha menggali dan memahami makna dan interpretasi yang mendasarinya terkait dengan fenomena sosial atau kemanusiaan, yang mencakup beberapa individu atau kelompok. Data penelitian diperoleh melalui upaya yang penting berupa mengajukan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang spesifik dari informan atau narasumber dan menganalisis data (Creswell, 2016). Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Agar peneliti bisa memahami suatu fenomena yang ada di lapangan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dimana pendekatan ini membantu peneliti untuk mengetahui secara rinci suatu permasalahan dalam penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang dilaksanakan secara terperinci untuk mengetahui suatu peristiwa, program serta aktivitas baik itu kelompok ataupun individu, dengan mengumpulkan informasi yang mendalam berdasarkan waktu yang ditentukan (Creswell, 2016). Pendekatan studi kasus ini dipilih karena peneliti bisa mendapatkan informasi secara luas dan mendalam, sehingga peneliti menggunakan pendekatan studi kasus guna bisa menjawab

pertanyaan penelitian untuk mengetahui bagaimana Desa Anti Politik Uang sebagai Gerakan Sosial di Desa Kepuh.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, observasi, atau laporan tidak resmi berupa dokumen. Data mentah ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti (Moleong, 2005). Taktik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan para ahli, termasuk anggota Bawaslu Batang itu sendiri, serta tokoh masyarakat atau kepala desa yang menentang kebijakan moneter. Wawancara mendalam berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengeksplorasi berbagai latar belakang peserta individu, sementara juga berfungsi untuk menilai keandalan dan konsistensi data yang dikumpulkan melalui pendekatan penelitian alternatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini memberikan dukungan terhadap data primer, seperti dokumen resmi, literatur penelitian, hasil penelitian berupa

laporan, tesis, jurnal, dan artikel berita. Hal ini untuk memperkuat pemahaman tentang fungsi Bawaslu dalam pemberantasan korupsi. Studi tentang dinamika politik di dalam komunitas lokal. Konsep anti politik uang mengacu pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memerangi dan mencegah pengaruh uang terhadap proses dan keputusan politik (Moleong, 2005).

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini banyak menggunakan prosedur pengumpulan data, termasuk penggunaan berbagai metode yang antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog terstruktur yang dilakukan dengan tujuan tertentu (Moleong, 2005). Dalam suatu percakapan melibatkan dua partisipan, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Peneliti memberikan ruang yang luas bagi informan atau partisipan penelitian untuk mengungkapkan pengetahuannya yang berkaitan

dengan subjek penelitian melalui sarana wawancara (saleh, 2017).

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode mengamati secara langsung suatu objek kajian dan mencatat peristiwa atau perilaku dalam kurun waktu tertentu secara wajar, otentik, dan spontan untuk memperoleh informasi yang akurat, terperinci, dan informatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan pengalaman langsung dan bertindak sebagai pemeriksa fakta. Selain itu, peneliti dapat bereksperimen dan melihat langsung dengan mengamati dan mencatat apa yang terjadi, dan dapat digunakan sebagai alat yang sangat berguna ketika metode komunikasi tidak memungkinkan (saleh, 2017).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data di mana banyak dokumen yang berkaitan dengan masalah studi dikumpulkan (Martono, 2016). Terkait dengan materi yang diperoleh, terdiri dari laporan komprehensif kinerja Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan) dan pembentukan pejabat, serta pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa, di samping

data profil Bawaslu di Batang Kabupaten , perlu diperhatikan pencantuman alat bantu visual seperti foto dan rekaman suara.

4. Teknik analisis data

Metodologi analisis data saat ini meliputi penggunaan data yang dikumpulkan oleh peneliti, diikuti dengan penerapan pendekatan analisis data tertentu. Analisis data adalah prosedur penting yang melibatkan penyederhanaan data untuk meningkatkan keterbacaan dan interpretasi seperti yang disajikan oleh penulis. Analisis data dilakukan selama durasi penelitian, mulai dari inisiasi hingga kesimpulannya. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis deskriptif kualitatif, untuk menelaah data yang terkumpul dalam penelitian ini (Bungin, 2015). Analisis ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian, dan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan rinci tentang fenomena yang ada.

Data yang diperoleh selanjutnya diproses ulang dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kelengkapannya. Selain itu, klasifikasi data digunakan untuk memfasilitasi wacana yang lebih metodis dan terorganisir (Abdurrahman, 2005). Analisis ini berfungsi sebagai metode inferensi, bertujuan untuk

mengidentifikasi secara objektif dan metodelis atribut informasi yang disampaikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengubah topik yang dibahas menjadi dataset yang terstruktur dan tepat.

5. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman penelitian secara metodelis, penulis menyusun struktur penulisan yang komprehensif dalam penelitian ini, yang terdiri dari enam bab utama dan beberapa sub bab. Wacana selanjutnya disusun secara sistematis :

a. BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini berisi pendahuluan yang bertujuan untuk melengkapi pembaca dengan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian selanjutnya. Secara khusus meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, dan metodologi penelitian, meliputi berbagai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan akademik ini akan berfokus pada berbagai pendekatan, sumber, dan jenis data, serta metodologi pengumpulan dan analisis data, serta pentingnya penulisan yang ber-sistematis.

b. BAB II (Teori Gerakan Sosial Baru, Mobilisasi Sumber Daya, dan Framing Sosial)

Bab ini memberikan gambaran tentang teori-teori yang digunakan dalam merumuskan skripsi dan kemudian akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari teori-teori tersebut dalam kerangka yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang dilakukan.

c. BAB III (Gambaran Umum Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Pada bab ini dijelaskan bagaimana gambaran umum lokasi yang dijadikan tempat penelitian, yaitu;

1) Profil Desa Anti Politik Uang Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, memuat Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kepuh, Visi Misi Desa Kepuh, dan Sejarah Desa Kepuh, memuat sejarah umum Pembinaan Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, berisi. Kecamatan, Kabupaten Batang, kemudian menggambarkan sosial budaya atau adat istiadat masyarakat dan perilaku serta budaya masyarakat

d. BAB IV (Sejarah Pembentukan Desa Anti Politik Uang)

Bab ini mengulas sejarah dan tahapan dalam kemunculan Desa Anti Politik Uang di

Desa Kepuh.

e. BAB V (Gerakan dan strategi Desa Anti Politik Uang)

Bab ini mengulas Gerakan an strategi dalam kemunculan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh.

f. BAB VI (Penutup)

Bab ini mencakup temuan, kritik, dan rekomendasi, di mana hasil menawarkan resolusi untuk masalah utama yang diselidiki dalam penelitian ini. Selain memberikan saran dan kritik yang berharga bagi penelitian ini, yang tentunya memiliki arti penting bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Gerakan sosial Baru (New Social Movement)

Gerakan sosial atau social movement adalah kegiatan sosial berupa gerakan atau tindakan oleh sekelompok orang atau organisasi. Gerakan sosial biasanya terfokus pada isu-isu politik atau sosial dengan menyebabkan, menolak, atau membela perubahan sosial. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori-teori klasik yang cenderung menenkankan aspek ekonomi dan structural dalam menjelaskan gerakan social.

Dalam kurun perubahan waktu, teori gerakan sosial terus berkembang. Hingga akhirnya muncul gerakan sosial baru (GSB). Gerakan ini juga disebut gerakan prespektif kultural. Perkembangannya berangkat dari sebuah rasa ketidakpuasan terhadap institusi sosial dan politik masyarakat kapitalis maju. Gerakan ini hadir dengan berbagai bentuk seperti, gerakan peluncutan senjata, anti nuklir, lingkungan, kebebasan sipil, anti rasisme, feminisme, perdamaian, isu kebebasan individu, termasuk gerakan LGBT. Semua gerakan itu mengambil bentuk yang anti institusional, non hierarkis, terdesentralisasi, dan kaya akan bentuknya. Pada umumnya, mereka yang terlibat dalam gerakan ini

merupakan kalangan yang berasal dari kelompok kelas menengah baru atau mereka yang melek terhadap pendidikan. Mereka biasanya bekerja di sektor non produksi, macam kalangan akademisi, kelompok seniman, LSM, para pekerja sosial kemanusiaan, dan kaum terdidik lainnya. Isu yang diangkat juga mengalami pergeseran dari isu-isu redistributive ke isu-isu kualitas hidup dan pasca material (Manalu, 2007).

Teori gerakan sosial baru adalah suatu pendekatan teoritis terbaru yang mendeskripsikan tentang perubahan karakter dari gerakan sosial klasik. Gerakan sosial baru identik dengan perubahan pada masa masyarakat post-industri di Eropa Barat dan Amerika Utara. Gerakan sosial baru merupakan istilah yang dipergunakan para ahli yang merujuk pada gerakan sosial yang terjadi pada 1960-an di negara maju yang sudah memasuki ekonomi masa post industri. Gerakan sosial baru mempunyai karakteristik baru dan unik. Ciri gerakan sosial baru lebih menekankan pada aspek non-material seperti gaya hidup dan kebudayaan. Dasar dari gerakan sosial baru adalah protes. Gerakan sosial baru merupakan bentuk kritik terhadap cara berpolitik para birokrat yang membuat mereka terasa terasingkan dari Masyarakat (Sukmana, Oman, 2016).

Gerakan ini menyoroti bahwa masyarakat modern mengalami krisis bukan hanya dalam aspek ekonomi,

tetapi juga dalam nilai, etika, dan cara berinteraksi social. Oleh karena itu, Gerakan Sosial Baru berorientasi pada pembentukan kesadaran kolektif, perubahan gaya hidup, serta tranformasi kultural yang tidak melulu disalurkan melalui sruktur politik formal. Dalam pendekatan ini, gerakan social tidak lagi digerakkan oleh partai politik atau organisasi massa besar, melainkan oleh komunitas-komunitas kecil yang memiliki kepekaan terhadap isu tertentu.

Kemajuan gerakan sosial dapat digambarkan ke dalam tahapan yang berbeda. Tahapan ini mencakup berbagai fase yang dilalui gerakan sosial saat mereka berkembang dan berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan analisis Macionis, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses gerakan sosial meliputi empat tahapan yang berbeda. Tahapan tersebut antara lain :

1. Emergence (Tahap kemunculan).

Gerakan sosial didorong oleh adanya masalah mendasar yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Banyak gerakan yang mengadvokasi masalah dalam masyarakat seperti hak-hak perempuan dan hak-hak sipil, muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan yang merajalela. Selanjutnya, gerakan sosial terwujud lebih lanjut, dipelopori oleh kelompok terbatas yang berfokus pada masalah tertentu.

2. *Coalescence* (Tahap penggabungan).

Sebuah gerakan baru memerlukan pembentukan identitasnya dan mencari strategi agar “go public”. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, menyusun strategi, membina moral, dan terlibat dalam perekrutan anggota baru. Selama fase ini, gerakan sosial dimungkinkan untuk terlibat dalam aksi kolektif, seperti mengorganisir protes, untuk menarik perhatian baik dari media maupun masyarakat umum. Gerakan sosial memiliki potensi untuk membangun aliansi strategis dengan organisasi lain untuk memperoleh sumber daya penting yang diperlukan untuk tujuan mereka.

3. *Bureaucratization* (Tahap birokratisasi).

Untuk mencapai pengaruh politik, gerakan sosial harus menunjukkan ciri-ciri yang terkait dengan birokratisasi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, konsolidasi gerakan akan tercapai, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemimpin karismatik. Ini akan dicapai dengan pendelegasian tanggung jawab kepada staf yang terlatih dengan baik, yang pada gilirannya meminimalkan kerentanan terhadap potensi disintegrasi.

4. *Decline* (Tahap kemunduran/penurunan).

Pada akhirnya, sebuah gerakan sosial akan

mengalami penurunan dampaknya. Ada lima faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran yang dialami oleh suatu gerakan sosial, yaitu: (1) Gerakan sosial berusaha menghadapi kemunduran sebagai konsekuensi dari kemandirian yang dirasakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (2) Gerakan sosial mengalami kegagalan karena kekurangan atau perselisihan organisasi yang melekat; (3) Sebuah gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi pemimpin; (4) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan, terutama dari luar; dan (5) Sebuah gerakan sosial mengalami kemunduran karena terbentuk dalam arus utama. Gerakan yang berbeda dapat diterima sebagai bagian dari sistem, sehingga status quo tidak ditentang (Macdonis, 1999).

Dalam konteks Gerakan Desa Anti Politik Uang, Gerakan sosial baru menjadi lensa penting untuk memahami dinamika perubahan social-politik yang terjadi di level desa. Masyarakat Desa Kepuh misalnya, secara kolektif membangun sikap kritis terhadap praktik politik uang bukan karena dorongan ekonomi, tetapi kesadaran bahwa tindakan tersebut merusak tatanan social dan menggerus nilai keadilan serta kepercayaan public. Gerakan ini juga bersifat

hirarkis, kepemimpinan yang muncul bersifat partisipatif dan berbasis pada tokoh lokal yang memiliki legitimasi moral di mata warga.

Hubungan antara Gerakan sosial baru dan gerakan desa anti politik uang dapat dilihat dari beberapa titik temu. Pertama, dari segi akar perlawanan, keduanya berangkat dari kesadaran terhadap adanya dominasi struktural – dalam hal ini, dominasi elite politik lokal yang memanfaatkan uang untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, dari segi orientasi nilai, keduanya menekankan pentingnya etika, integritas, dan partisipasi warga sebagai inti dari demokrasi. Ketiga, dari segi strategi pergerakan, gerakan desa anti politik uang tidak bertumpu pada struktur formal seperti partai politik atau organisasi besar, tetapi justru tumbuh dari kekuatan sosial warga, tokoh adat, kelompok pemuda, dan komunitas lokal yang terhubung melalui relasi sosial dan kultural.

Selain itu, teori GSB juga menekankan pentingnya dimensi simbolik dan kultural dalam gerakan sosial. Hal ini tampak dalam gerakan desa anti politik uang yang menggunakan simbol-simbol lokal seperti tikar musyawarah, kesenian rakyat, atau narasi adat sebagai media penyampaian pesan moral dan politik. Penggunaan strategi ini menunjukkan bahwa

perlawanan terhadap politik uang tidak dilakukan melalui konfrontasi fisik, melainkan melalui penyadaran dan pembentukan opini publik secara kultural.

Dengan demikian, Gerakan Desa Anti Politik Uang dapat dikatakan sebagai bentuk Gerakan social karena : berbasis pada kesadaran nilai bukan kepentingan ekonomi semata, tumbuh dari inisiatif komunitas bukan tekanan insitusi, memanfaatkan ruang- ruang social informal dan, mengedepankan transformasi budaya politik daripada perubahan structural jangka pendek. Pemahaman ini menjadi penting untuk merumuskan srategi penguatan demokrasi berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan dan bermakna.

B. Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory/RMT*) pertama kali muncul pada akhir 1960-an dan berkembang pesat pada dekade 1970-an sebagai respons terhadap pendekatan- pendekatan sebelumnya yang menekankan aspek psikologi massa atau *collective behavior* semata. Alih-alih melihat aksi kolektif sebagai “ledakan emosional” yang spontan, RMT memfokuskan perhatian pada bagaimana faktor-faktor organisasi, sumber daya, dan strategi memungkinkan

sebuah gerakan sosial untuk muncul, bertahan, dan berpengaruh dalam jangka panjang. Secara garis besar, RMT berasumsi bahwa gerakan sosial merupakan hasil dari proses yang relatif rasional dan terorganisir, bukan sekadar kerumunan emosional (Charty, 1997) .

Keberhasilan suatu gerakan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan, mengalokasikan, dan memelihara sumber daya material maupun non-material. Para aktor gerakan seperti individu, kelompok, lembaga berperan sebagai *entrepreneur* atau wirausahawan sosial yang melakukan kalkulasi strategis untuk mencapai tujuan bersama.

Asumsi-asumsi dasar RMT bahwa gerakan sebagai entitas organisasi, gerakan sosial dianggap sebagai organisasi-organisasi formal atau informal yang mengatur aktivitas, struktur, peran, dan strategi. Artinya, perhatian utama terletak pada struktur organisasi, bagaimana hierarki, komite, atau jaringan diinternalisasi oleh peserta gerakan. Kalkulasi rasional pelaku gerakan juga diperlukan baik individu maupun kelompok melakukan perhitungan rasional, mereka mau bergabung dan berkorban jika “biaya” seperti waktu, tenaga, risiko dianggap sebanding dengan “manfaat” perubahan sosial, penghargaan moral, akses ke kekuasaan. Pentingnya sumber daya bahwa keberhasilan gerakan ditentukan oleh ketersediaan

dan pengelolaan berbagai jenis sumber daya, mulai dari dukungan dana, tenaga relawan, akses media, hingga legitimasi moral dan kultural. Peran pendukung eksternal, selain sumber daya internal, gerakan sering kali memerlukan dukungan eksternal baik berupa pendanaan lembaga donor, akses jaringan advokasi, atau “jembatan” komunikasi dengan media massa dan aktor-aktor kuasa politik (Edelman, 2001).

Untuk memahami dinamika gerakan desa anti politik uang secara lebih menyeluruh, diperlukan pendekatan teoritis yang tidak hanya melihat aspek nilai dan identitas seperti dijelaskan dalam teori Gerakan Sosial Baru (GSB), tetapi juga mencakup aspek strategis dan struktural dari gerakan, sebagaimana ditegaskan oleh teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory/RMT*). Jika GSB menyoroti latar belakang moral, identitas, dan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar perlawanan warga desa terhadap politik uang, maka RMT menekankan pentingnya strategi, organisasi, dan penggunaan sumber daya dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas gerakan.

Teori Mobilisasi Sumber Daya memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya sebuah gerakan. Teori mobilisasi sumber daya yaitu berasumsi jika dalam

suatu masyarakat muncul ketidakpuasan maka akan memunculkan suatu gerakan sosial. Dalam teori ini faktor organisasi dan kepemimpinan menjadi sebuah faktor yang mendorong dan menghambat sebuah keberhasilan gerakan sosial (Sukmana, 2016).

Gerakan sosial tentu membutuhkan sumber daya dalam melakukan aktivitasnya, oleh karena itu gerakan sosial mempunyai tugas utama yaitu memobilisasi pendukung dan mengorganisasi sumber daya agar dapat melakukan perubahan sosial demi terwujudnya suatu gerakan tersebut. Selanjutnya, McCarthy dan Zaid memperluas konsep mobilisasi yang menyatakan bahwa mobilisasi adalah mengacu kepada berbagai aktivitas dari suatu organisasi gerakan sosial atau actor individual untuk mendapatkan control atas barang-barang yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan tujuan dari organisasi gerakan atau actor individual (OPP, 2009).

Teori *mobilisasi* sumber daya dan teori gerakan sosial baru, merupakan perspektif utama yang mendominasi studi gerakan sosial masa kini. Kedua teori tersebut tidak hanya berpengaruh dalam konteks global, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan gerakan sosial di negara-negara dunia ketiga. Dalam konteks ini, terdapat berbagai pandangan yang mencoba memahami keberadaan gerakan sosial dan

kelompok aksi di negara-negara berkembang. Sebagian kalangan menilai bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan bagian dari proses transisi menuju sosialisme, sementara pandangan lain melihatnya sebagai upaya awal dalam pembentukan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis.

Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses-proses social yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Teori ini berasumsi bahwa factor penting kelompok melakukan mobilisasi karena memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan, terdapatnya anggota dengan kemapanan kepemimpinan dan adanya partisipasi tradisional dari anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, terdapat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial dan berbagai kepercayaan, symbol serta bahasa yang sama. Sehingga, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa factor-faktor determinan dalam suatu gerakan social menurut teori mobilisasi sumberdaya, yakni :

1. *Organisasi* gerakan sosial, merupakan system nilai bersama, perasaan dari komunitask norma tindakan dan struktur organisasi.
2. Pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin di definisikan sebagai pembuat keputusan srategis yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk

berpartisipasi, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan.

3. Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, terdapat lima tipe sumberdaya dalam gerakan sosial, yakni : sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia dan sumber daya material.
4. Jaringan dan partisipasi, jaringan sosial merupakan factor pelekak bagi sebagian besar anggota dalam berbagai organisasi.
5. Peluang dan kapasitas masyarakat, prespektif ini mengacu pada kemampuan masyarakat local untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif. Teori mobilisasi sumberdaya diatas akan melihat sejauh mana gerakan yang dilakukan oleh Desa anti Politik uang dapat diterima oleh masyarakat dan bertahan hingga sekarang ini (OPP, 2009).

Gerakan "Desa Anti Politik Uang", teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa gerakan desa anti politik uang merupakan bentuk kontemporer dari gerakan sosial yang memiliki ciri khas sebagai Gerakan Sosial Baru (GSB). Gerakan Sosial Baru menekankan bahwa gerakan sosial tidak lagi hanya dipicu oleh ketimpangan ekonomi atau tuntutan struktural, tetapi lebih kepada krisis nilai,

identitas, dan moralitas sosial. Dalam konteks desa, politik uang dipandang bukan sekadar pelanggaran aturan pemilu, tetapi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai lokal seperti kejujuran, gotong royong, dan integritas sosial. Oleh karena itu, gerakan penolakan terhadap politik uang di desa muncul sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif warga yang ingin mempertahankan etika politik dan tatanan sosial yang sehat.

Namun, kesadaran dan nilai saja tidak cukup untuk membentuk gerakan yang efektif. Di sinilah teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory/RMT) menjadi relevan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah gerakan sangat tergantung pada kemampuan kolektif untuk mengorganisasi diri dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, seperti jaringan sosial, legitimasi tokoh lokal, media komunitas, dan forum musyawarah. Gerakan desa anti politik uang membutuhkan strategi kampanye, pengelolaan dukungan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara terencana agar tidak hanya menjadi suara protes, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku politik (Jenkins, 1983)

Tabel 2. 1 Tipe-tipe sumber daya dan cara pemanfaatannya

No.	Kategori Sumber Daya	Contoh Pemanfaatan dalam Gerakan Sosial
1	<i>Moral Resources</i> (Sumber Daya Moral)	Dukungan tokoh agama/ masyarakat yang berpengaruh “Legitimasi moral” dari organisasi keagamaan atau LSM, Kampanye etika dan kesadaran
2	<i>Cultural Resources</i> (Sumber Daya Budaya)	Simbol (baju seragam, poster, lagu protes) Bahasa dan jargon khusus (misalnya slogan/sandi gerakan), Pengetahuan teknis tentang cara berdemo atau advokasi yang efektif (misalnya cara membuat pamflet)
3	<i>Social- Organizational Resources</i> (Sumber Daya Organisasi)	Jejaring antar-LSM, ormas, komunitas Kantor sekretariat, ruang rapat, alat komunikasi (HP, internet), Tim humas/ hubungan pers

4	<i>Human Resources</i> (Sumber Daya Manusia)	Relawan (<i>volunteers</i>) terlatih , Aktivis profesional (juru bicara, pengacara, penterjemah) , Tenaga administrasi dan logistic
5	<i>Material Resources</i> (Sumber Daya Material)	Dana kas (iuran anggota, sumbangan masyarakat, hibah), Peralatan aksi (<i>sound system</i> , spanduk, tenda) Transportasi (bus, mobil pick- up)

Kritik dan kelemahan RMT meskipun banyak digunakan, RMT juga mendapat beberapa kritik utama pertama, terlalu fokus pada faktor internal bahwa RMT kerap dinilai terlalu menitikberatkan pada sumber daya dan organisasi internal, sehingga kurang memberi perhatian pada motivasi ideologis mendalam atau faktor budaya yang mendorong partisipasi (Snow D. A., 1986) Kedua, kurang memperhatikan emosi dan *identity framing* bahwa pendekatan RMT cenderung “rasional-rasional” dan mengabaikan peran emosi kolektif misalnya solidaritas moral, rasa marah yang intens serta proses framing identitas. Ketiga, kecenderungan *economic turn* hal ini mengatakan RMT sering dipandang sebagai

memperlakukan gerakan sosial bak perusahaan yang memperebutkan *market share* dana dan relawan, sehingga mengurangi nuansa idealisme. Keempat, kurang sensitif pada ketimpangan struktur sosial bahwa RMT kadang kurang membedah bagaimana struktur sosio-ekonomi seperti kelas, gender, ras menentukan akses sumber daya, padahal kelompok marginal sering punya keterbatasan akses dana dan jaringan.

C. Teori Framing Sosial

Pada akhir 1970-an hingga pertengahan 1980-an, Teori Mobilisasi Sumber Daya (*“Resource Mobilization Theory”*) menjadi paradigma dominan dalam studi gerakan sosial. Teori ini fokus pada “apa” yang harus dimobilisasi (misalnya: dana, tenaga relawan, jaringan organisasi) agar gerakan sosial dapat berjalan. Namun, pada era akhir 1980-an sampai awal 1990-an, para peneliti gerakan sosial merasa bahwa model mobilisasi saja belum cukup menjelaskan “bagaimana” gerakan itu mengorganisasi makna, membentuk kesadaran, dan memengaruhi persepsi publik. Mereka mulai menyoroti pentingnya aspek interpretasi simbolis, bagaimana isu dipresentasikan sehingga dapat memobilisasi dukungan. Dari sinilah kemudian Teori Framing Sosial (*“Social Movement Framing Theory”*) mulai dirumuskan sebagai kerangka kerja yang menekankan bagaimana aktor gerakan

menyusun “frame” (kerangka interpretasi) agar ide gerakan dapat diterima, diinternalisasi, dan diaktualisasikan oleh publik sasaran.

Snow, Rochford, Worden, & Benford (1986) menjadi salah satu tulisan pionir yang memperkenalkan istilah *frame alignment processes*, yaitu bagaimana aktor-aktor gerakan sosial melibatkan publik dengan menyelaraskan frame gerakan dengan keyakinan dan nilai yang telah ada. kemudian secara eksplisit menegaskan bahwa gerakan sosial bukan hanya tentang sumber daya, tetapi tentang penciptaan makna bersama. Mereka merumuskan tiga dimensi framing:

1. *Diagnostic Framing* yaitu menetapkan “apa” masalahnya. Seberapa kuat pesan bahwa politik uang adalah racun demokrasi desa dapat diukur melalui frekuensi dan konsistensi penyebutan di berbagai kanal seperti pengajian, rapat, media social.
2. *Prognostic Framing* yaitu menawarkan “bagaimana” jalan keluar. Adanya mekanisme tindakan nyata seperti satgas, deklarasi, hotline pelaporan diukur melalui ketersediaan SOP dan jumlah laporan valid ke posko.
3. *Motivational Framing* yaitu memberi “alasan” moral/emosional untuk bertindak. Kuatnya *call to action* moral dan emosional diukur melalui analogi

agama, bahasa emosional, dan testimoni di setiap sosialisasi.

Pada awal 1990-an, konsep framing semakin berkembang ketika peneliti seperti Susanne C. Seidman menonjolkan analisis “bagaimana gerakan buruh dan gerakan politik di kawasan Global Selatan memproduksi makna militansi,” yang kemudian mengkaji framing sebagai proses kulturel dan historis, bukan sekadar strategi komunikasi semata. Era 1980-an di Amerika Serikat dan Eropa menandai meluasnya studi tentang “identitas kolektif” dan “budaya politik”. Banyak gerakan mulai muncul dengan narasi narasi, misalnya gerakan lingkungan, kesetaraan gender, hak sipil yang tidak lagi hanya menyoal distribusi sumber daya, melainkan juga tentang makna, simbol, dan identitas. Ketidakpuasan atas fokus “rasional- material” dalam *Resource Mobilization* membuat para sarjana merasa perlu menekankan faktor “kultural-interpretatif.” Dari sinilah framing muncul sebagai pendekatan komplementer yang menjelaskan proses pembentukan makna (*meaning-making*) dalam gerakan.

Berikut tokoh-tokoh utama dan karya-karya kunci yang sering dianggap pelopor Teori Framing Sosial:

1. *David A. Snow*, karya utama seperti *Snow, D. A., Rochford, E. B., Worden, S. K., & Benford, R. D.*

- (1986). *Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation*. American Sociological Review. Dalam artikel ini, Snow dkk. memperkenalkan konsep *frame alignment*, yaitu mekanisme bagaimana gerakan sosial menyelaraskan frame mereka dengan interpretasi dan nilai-nilai calon pendukung. Tulisan ini memaparkan tiga jenis framing (diagnostic, prognostic, motivational) dan membahas pentingnya *frame resonance* sejauh mana frame gerakan “mengena” pada keyakinan calon peserta/pendukung (Snow D. A., 1986)
2. Robert D. Benford, karya utama seperti Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. Annual Review of Sociology. Merupakan artikel sintesis yang merangkum perkembangan riset framing, termasuk dinamika produksi frame di dalam gerakan, penyebaran frame, dan dampaknya terhadap mobilisasi (Benford, 2000). Konsep *master frame* yang cukup umum sehingga dapat diadaptasi oleh berbagai gerakan berbeda diperkenalkan di sini.
 3. Susanne C. Seidman karya utama seperti Seidman, S. C. (1990). *Manufacturing Militance: Workers' Movements in Brazil and South Africa*,

1970–1985. University of California Press. Seidman mengeksplorasi bagaimana gerakan buruh di dua negara berbeda memproduksi makna tentang “militansi” (berjuang secara militansi) melalui konteks budaya dan politik lokal. Ia menyoroti proses framing yang berakar pada pengalaman historis dan kultural (Seidman, 1990).

Meskipun fokus utamanya pada aktivisme transnasional, Seidman juga menggarisbawahi bagaimana gerakan memadukan isu hak buruh dan hak asasi manusia menjadi satu frame yang lebih luas.

Pada Teori Framing Sosial, konsep *Frame Alignment* diperkenalkan pertama kali oleh Snow, Rochford, Worden, dan Benford (1986) sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana aktor gerakan sosial menyelaraskan “*frame*” (kerangka interpretasi) gerakan mereka dengan keyakinan, nilai, dan cara pandang audiens sasaran. Tujuannya agar narasi gerakan dapat “*resonate*” (mengena) dan memotivasi partisipasi. Snow dan Benford (1988) kemudian merinci empat jalur utama *Frame Alignment Processes*:

1. *Frame Bridging*
2. *Frame Amplification*
3. *Frame Extension*
4. *Frame Transformation*

Berikut uraian masing-masing jalur, disertai contoh konkret dalam penelitian Gerakan Desa Anti Politik Uang:

1. *Frame Bridging*, adalah proses menghubungkan atau “menjembatani” dua kelompok atau lebih yang memiliki *pre-existing grievances* (keluhan atau masalah) serupa, namun sebelumnya terpisah karena perbedaan keyakinan/konteks (Snow D. A., 1988). Tujuannya adalah menciptakan koalisi sementara dengan memanfaatkan kesamaan masalah tanpa harus merombak identitas atau keyakinan dasar kelompok sasaran. Contoh dalam penelitian Gerakan Desa Anti Politik Uang, di Desa Kepuh, ada dua kelompok utama yang semula tidak terhubung yaitu, Kelompok Ibu-ibu PKK yang prihatin terhadap ketidakadilan distribusi bantuan sosial (Bansos) karena calon kepala desa tertentu menawarkan politik uang untuk mempengaruhi penerima Bansos. Kelompok Santri/Remaja Masjid yang gelisah melihat praktik jual-beli suara bertentangan dengan ajaran kejujuran dalam Islam. Gerakan Anti Politik Uang mengambil inisiatif untuk memfasilitasi “forum silaturahmi” antara kedua kelompok. Meskipun latar belakang keprihatinan mereka berbeda ekonomi keluarga vs. nilai agama, masalah

inti yang sama adalah “Politik uang merusak keadilan dan kesejahteraan warga”. Melalui *Frame Bridging*, gerakan menyusun narasi bahwa “Baik ibu-ibu PKK maupun santri, kita sama-sama dirugikan ketika calon kepala desa menggunakan uang untuk membeli suara, anak santri kehilangan teladan kejujuran, ibu-ibu kehilangan hak atas Bansos yang benar-benar layak diterima.” Hasilnya, kedua kelompok mau bergabung dalam satu “Relawan Pemantau TPS” meski sebelumnya tidak memiliki koneksi aktif (Snow D. A., 1986). Pada halaman 467–472, penulis menguraikan konsep dasar *Frame Bridging*, termasuk karakteristik audiens yang “belum terorganisir” tetapi memiliki *grievance* serupa).

2. *Frame Amplification*, adalah proses memperjelas, menegaskan, atau meneguhkan kembali keyakinan, nilai, atau norma yang sudah ada di masyarakat sasaran agar mereka lebih termotivasi untuk bergabung atau mendukung gerakan (Snow D. A., 1986). Intinya, tidak menciptakan nilai baru, melainkan memperkuat keyakinan yang telah ada. Contoh dalam penelitian Gerakan Desa Anti Politik Uang, di Desa Kepuh, terdapat nilai lokal yang kuat tentang “gotong royong” dan “kejujuran” nilai-nilai ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Gerakan

memanfaatkan *Frame Amplification* dengan merancang pengajian khusus yang menekankan “*Kejujuran adalah pesantren, gotong royong adalah darah desa kita. Bila kita membiarkan politik uang, kita membunuh nilai kejujuran itu.*” Poster dan spanduk bertuliskan “*Warga Kepuh Bangun Desa dengan Gotong Royong, Bukan dengan Uang.*” Dialog santai (kelompok dini) di tingkat RT, mengutip pepatah lokal: “*Hanya Tuhan dan leluhur yang tak menakar kebaikan dengan angka.*” Pesan ini tidak memunculkan nilai baru, hanya mempertegas nilai kejujuran dan rasa saling menolong yang sesungguhnya sudah dijunjung tinggi. Dampaknya adalah warga yang sebelumnya meragukan apakah menolak politik uang “memang benar,” menjadi lebih yakin karena merasa “inilah esensi budaya kita (Snow D. A., 1986). Dalam tinjauan ini, terdapat penjelasan tambahan (hal. 620–625) tentang bagaimana *Frame Amplification* berfungsi untuk memperkuat nilai yang sudah tersebar luas di masyarakat.)

3. *Frame Extension*, adalah proses memperluas cakupan isu gerakan dengan memasukkan isu-isu tambahan yang sudah menjadi perhatian atau

relevan bagi audiens sasaran (Snow D. A., 1986). – Pada bahasan *Frame Alignment* (hal. 207–210), dijelaskan bahwa *Frame Extension* berusaha “memperluas jangkauan” bagan isu agar audiens yang sebelumnya tidak terkoneksi menjadi merasa isu itu juga menyangkut kepentingan mereka). Dengan begitu, gerakan tampak tidak hanya membicarakan satu topik sempit, melainkan “terkoneksi” dengan hal-hal lain yang lebih luas membuat mereka lebih mudah terhubung. Contoh dalam Penelitian Gerakan Desa Anti Politik Uang, pada awalnya, kampanye hanya menekankan “melawan politik uang karena merusak integritas pemilu.” Namun banyak warga di Kepuh menganggap pemilu terlalu “jauh” dengan keseharian mereka. Melalui *Frame Extension*, gerakan menambahkan isu-isu lain yang lebih dekat dengan kehidupan “*Politik uang juga berpengaruh pada kesejahteraan keluarga, kalau desa dipimpin oleh calon yang bayar suara, dana desa (DD) dipakai untuk korupsi, alokasi Bansos jadi terhambat.*” Ada lagi “*Pendidikan anak kita terancam, karena guru honorer diangkat bukan berdasarkan kompetensi, melainkan titipan politik uang.*” Lalu “*Akses kesehatan warga bisa terganggu,*

paket bantuan medis tidak lagi tepat sasaran.” Dengan rangkaian isu ini, kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan warga yang tadinya merasa “*politik uang hanya urusan caleg/petahana,*” mulai melihat relevansi langsung: “*Oh, jika saya melawan politik uang, artinya saya menjaga biaya sekolah anak dan perawatan ibu saya.*” Akhirnya, dukungan gerakan meluas ke kalangan ibu-ibu PKK, guru, dan kader kesehatan desa.

4. *Frame Transformation*, adalah proses paling “radikal” dalam *Frame Alignment*, yaitu melakukan perubahan mendasar (*ideological shift*) dalam cara audiens memandang suatu isu. Di sini, aktor gerakan menantang, membongkar, dan kemudian membentuk ulang kerangka keyakinan/prinsip yang sudah tertanam (Snow D. A., 1988). Bagian “*Frame Transformation*” dijelaskan secara mendalam pada halaman 210–215, termasuk kondisi “kesediaan audiens” untuk menerima ideologi baru setelah mengalami kekecewaan atau “*crisis of meaning*.” Proses ini memerlukan “*crisis of meaning*” sehingga audiens merasa perlu mengadopsi perspektif baru). Contoh dalam penelitian Gerakan Desa Anti Politik Uang, sebagian

warga awalnya meyakini “Politik uang itu wajar, asal tidak berlebihan” atau “Uang Rp 100.000 itu ‘kecil’, nanti juga saya coblos orang lain jika dapat.” Gerakan menampilkan bukti-bukti empiris, misalnya data kasus menunjukkan hasil investigasi di desa tetangga menyatakan kader desa yang menang karena bayar suara, justru memotong anggaran pendidikan dan proyek infrastruktur. Kemudian, testimoni warga mengatakan seorang guru honorer yang mengaku tidak sanggup bayar “titipan” caleg sehingga keluarganya menyekolahkan anak di luar desa lebih susah. Dengan *Frame Transformation*, gerakan menegaskan “Ini bukan sekadar soal ‘kecil’ atau ‘besar’ bahwa ‘politiking’ dengan uang sama saja merusak tatanan keadilan desa. Bila kita membiarkan wawasan ‘politik uang wajar,’ maka kita merelakan generasi berikutnya hidup di sistem yang tidak adil, di mana yang kaya selalu menang.” Akibatnya, persepsi warga yang awalnya “toleran” berubah menjadi “mengutuk” politik uang sebagai sesuatu yang wajib ditolak “bahkan jika uang yang ditawarkan kecil sekalipun.

Gerakan Desa Anti Politik Uang berhasil karena kemampuan aktor lokal seperti tokoh agama, pemuda, perangkat desa yang menyusun dan menjual “*frame*” yang

resonan dengan nilai-nilai kultural Desa Kepuh. Resonansi Frame dengan nilai kultural lokal, dalam Teori Framing Sosial, keberhasilan mobilisasi sangat bergantung pada sejauh mana “*frame*” gerakan dapat mengena (*resonate*) dengan sistem keyakinan, norma, dan praktik budaya yang sudah ada di masyarakat sasaran (Snow D. A., 1986). Di Desa Kepuh, nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan ukhuwah (persaudaraan) merupakan pilar budaya desa yang sudah lama diwariskan. Ketika aktor lokal seperti tokoh agama, pemuda pesantren, dan perangkat desa mengemas pesan anti politik uang dalam kerangka (*frame*) yang mempertegas nilai-nilai tersebut, maka warga merasa bahwa penolakan terhadap politik uang bukan sekadar tuntutan moral baru, melainkan kelanjutan tradisi budaya mereka sendiri (Snow D. A., 1986).

Peran aktor lokal sebagai agen framing, seperti tokoh agama dan ketua RW di Desa Kepuh memiliki legitimasi moral dan otoritas simbolik untuk membingkai (*frame*) persoalan politik uang sebagai “ancaman terhadap keharmonisan sosial” Pemuda, sebagai kelompok yang relatif lebih aktif di media sosial komunitas, berperan menyebarkan frame melalui WhatsApp grup dan Facebook Page desa, sehingga memperluas jangkauan resonansi kepada generasi muda. Perangkat desa (kepala desa dan sekretaris) dapat memfasilitasi ruang formal

(musyawarah desa, rapat RT/RW) sebagai kanal legitimasi penangkapan isu, sehingga *frame* tidak hanya bersifat “eksklusif” tetapi juga “inklusif” dalam struktur pemerintahan desa.

Sinergi antara kultural-struktural, keberhasilan kerangka framing ini muncul karena adanya keselarasan antara isi pesan (“*frame*”) politik uang dipandang “runtuhnya keadilan,” “pengkhianatan gotong royong,” dan “kejahatan moral.” Kemudian, saluran budaya/keagamaan pengajian, majelis taklim, dan shalawatan di masjid sebagai medium penguatan *frame* (McAdam, 1996) Lalu, institusi formal desa musyawarah, pengumuman resmi di balai desa, dan pertemuan RT/RW oleh karenanya, gerakan tidak sekadar berbentuk aksi spontan, tetapi juga terstruktur melalui lembaga- lembaga lokal. Dengan demikian, aktor lokal yang mampu menjual *frame* secara utuh menggabungkan nilai-kultural, kanal komunikasi dan legitimasi formal membuat pesan anti politik uang menjadi milik bersama warga Desa Kepuh.

Perumusan “*Frame*” tentang bahaya politik uang yang memunculkan, bagaimana “*frame*” tentang bahaya politik uang dirumuskan oleh jaringan tokoh kunci seperti tokoh agama, ketua RW, pemuda, dan melalui saluran apa seperti, pengajian, musyawarah RT, balai desa, media sosial komunitas? Hal ini dapat dilakukan dengan proses

kolaboratif perumusan *frame*, pertama kelompok inti (*core framers*) seperti tokoh agama sebagai “*moral entrepreneur*” memulai perumusan framing dalam pengajian mingguan dengan menekankan aspek keagamaan “*Politik uang adalah bentuk zuhud palsu, memperjualbelikan suara sama dengan korupsi moral.*” Kedua, Ketua RW dan Perangkat Desa sebagai “*structural brokers*” menambahkan data empiris dari tingkat desa (misal, laporan Bawaslu tahun sebelumnya, kasus bansos terhambat) ke dalam narasi “*Data 2009–2024 menunjukkan desa tetangga menyelewengkan dana PKH ketika memilih kepala desa melalui politik uang.*”). Ketiga, pemuda sebagai “*cultural brokers*” berkontribusi mengemas bahasa kekinian di media sosial komunitas, misalnya meme, grafis sederhana, atau pesan video pendek “*#SuaraBukanKomoditas, Stop Suap, Stop Sakit Hati*”.

Dapat juga menggunakan saluran komunikasi dan penyebaran *frame*, seperti pengajian dan majelis taklim, media primer untuk menyentuh warga yang religius. Dalam forum ini, pesan framing dibingkai dalam bahasa agama, meminjam ayat atau hadits yang menolak riba dan suap. Kemudian, musyawarah RT/RW & musyawarah desa, saluran formal pemerintahan desa. *Frame* dirumuskan dan disepakati dalam rapat rutin setiap bulan) untuk dijadikan poin adendum dalam RPJMDes (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa). Pada momen “musdes khusus pra-pemilu,” narasi dikerucutkan menjadi “pokok pikiran desa menolak politik uang” . Memasang spanduk dan pengumuman resmi di Balai Desa juga penting, tempat teritorial simbolik di mana frame dipampang secara visual melalui banner “*DESA KEPUH MENOLAK POLITIK UANG: Suara Kita Harga Mati!*” Banner ini dipadukan dengan logo desa (gambar gotong royong). Pemanfaatan media sosial komunitas (*WhatsApp Group, Facebook Page “Kepuh Bersih”*) perlu diupayakan, digunakan untuk menyebarkan kutipan ceramah, infografis alasan menolak politik uang, dan testimoni warga yang pernah dirugikan. Narasi diolah dalam bentuk teks singkat, video berdurasi ≤ 1 menit, serta stiker WhatsApp bertuliskan “*NO Money Politics.*”

Strategi “*Frame Alignment*” yang dijalankan dapat menimbulkan pertanyaan umum, yaitu bagaimana strategi “*frame alignment*” dijalankan. Terutama tentang proses adopsi dan penyesuaian narasi dari kasus desa lain (*frame bridging*), penguatan narasi berbasis kearifan lokal (*frame amplification*), perluasan topik (*frame extension*) untuk merangkul isu kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan proyek desa, Upaya mengubah sudut pandang warga yang semula menolerir politik uang (*frame transformation*).

1. *Frame Bridging* (adopsi dan penyesuaian narasi dari kasus desa lain). Contoh kasus desa lain, Desa Sidomulyo (Kabupaten Purbalingga) berhasil menekan politik uang dengan deklarasi “Desa Sadar Suara” pada 2022, disesuaikan menjadi “*Kepuh Berdaya, Suara Harga Mati, Berani Lawan Politik Uang.*” Penyesuaian bahasa lokal menggunakan pantun dan tembang macapat saat deklarasi di balai desa agar warga merasa ini cerita kita. Dengan tujuan *Frame Bridging* membangun rasa kebersamaan lintas wilayah. Memberi contoh praktik yang sudah terbukti berhasil, sehingga meningkatkan kredibilitas gerakan di kepuh.
2. *Frame Amplification* (penguatan narasi berbasis kearifan lokal), dengan kearifan lokal di Kepuh seperti gotong royong warga sudah terbiasa kerja bakti rutin, musyawarah (Semanggi) bahwa prinsip musyawarah mufakat menjadi rujukan pengambilan keputusan, konsep “Ruwatan” ritual untuk “membersihkan” desa dari bala (termasuk bala moral seperti korupsi (McAdam, 1996). Strategi penguatan dapat dilakukan dengan setiap kegiatan sosialisasi diawali dengan “gotong royong bersih desa” membersihkan balai desa sembari membahas kenapa politik uang merusak semangat kebersamaan.

Mengadopsi istilah “ruwatan moral” setiap kali ada kasus politik uang melakukan doa bersama untuk memohon perlindungan agar desa tetap bersih dari suap-suap politik. Membuat slogan lokal “*Tanpa Uang, Tanpa Korup Desa Kepuh Semakin Sehati.*” Tujuan *Frame Amplification*, meneguhkan kembali keyakinan bahwa kejujuran dan kebersamaan adalah inti kehidupan desa. Lalu, membuat warga merasa gerakan ini bukan hal “asing,” melainkan kelanjutan rutinitas budaya yang sudah ada.

3. *Frame Extension* (perluasan topik mengaitkan dengan isu lain). Rangkaian isu yang dapat diintegrasikan adalah isu kesejahteraan keluarga, menjelaskan bahwa “Jika kepala desa terpilih karena politik uang, dana PKH dan PKL (Program Keluarga Harapan & Keluarga Ketahanan Pangan Lokal) bisa direlokasi untuk bayar utang kampanye anak sekolah kita yang jadi korban.” Isu pendidikan anak dengan mengaitkan “Politik uang juga memengaruhi penempatan guru honorer banyak guru kompeten diabaikan, digantikan guru titipan caleg.” Isu proyek desa infrastruktur dan irigasi, menekankan “Kalau Kades menang lewat suap, *APBDes* dialihkan untuk bayar ‘timses’ alih-alih bangun jalan atau perbaikan irigasi.” Metode penyebarannya dengan

diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan ibu-ibu PKK, ketua kelompok tani, dan ketua panitia program desa. Penyebaran isu melalui infografis di WhatsApp grup yang menunjukkan alokasi APBDes “60% *Uang Kampanye vs. 40% Proyek.*” Dapat juga dengan cerita pendek yang diunggah ke *Facebook Page* desa “*Pak Batar, Petani di Kepuh, Kehilangan 2 Hektar Sawah karena Irigasi Rusak Dana Bansos Dipakai untuk Menang Pilkades.*” Tujuan *Frame Extension* adalah menghubungkan *politic of money* dengan persoalan kehidupan sehari-hari, sehingga warga merasa punya *stake* (kepentingan) langsung. Juga merangsang partisipasi warga yang tadinya menganggap “*politik uang kerjanya negara,*” tetapi kini melihat dampak mikro di keluarga dan lahan pertanian.

4. *Frame Transformation* (mengubah sudut pandang warga yang toleran). Kondisi Awal Warga yang percaya slogan “*Uang Rp 50.000 wajar, nanti kami coblos caleg lain*” masih banyak disetujui. Juga perasaan “*politik uang hanya kecaman moral, tapi bukan prioritas*” cukup kuat. Maka dapat menggunakan strategi transformasi, memamerkan dampak empiris jangka panjang dengan data Bawaslu Provinsi Jateng menunjukkan 30% desa yang toleran

politik uang mengalami kemerosotan kualitas pelayanan publik pasca pilkades 2023 (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Laporan Keadaan Pemantauan Politik Uang di Desa-Desa, 2023*). Juga testimoni mantan ketua BPD Desa A yang menyatakan bahwa “*Kami menangis, anak yatim piatu di desa kami tidak dapat beasiswa karena dana diselewengkan.*” Strategi selanjutnya menerapkan metode dramatis yaitu pertunjukan teater singkat di balai desa yang memvisualisasikan “*desa direnggut kemiskinan ketika kepala desa iseng bayar suara.*” Kemudian, pemutaran cuplikan video wawancara langsung dengan keluarga yang kehilangan manfaat bansos. Dapat juga diskusi dengan kelompok terpadu (*crossover discussion*) di mana warga dengan pandangan toleran (*frame* lama) dipertemukan dengan warga yang sudah menolak (*frame* baru), lalu diminta menceritakan pengalaman pribadi, proses ini memicu krisis makna sehingga akhirnya warga dua kali berpikir sebelum menerima uang suara (Snow D. A., 1988). Tujuan *Frame Transformation* adalah membuat warga yang tadinya biasa saja terhadap politik uang mengalami *shock* kognitif dan emosional dari wajar menjadi menjijikkan. Kemudian, menumbuhkan

komitmen etis “*Jika saya dulu ikut menerima suap, malu saya harus reparasi pilkades selanjutnya.*”

Ukuran efektivitas framing, menimbulkan pertanyaan utama yaitu efektivitas framing tersebut dapat diukur melalui apa saja. Pertama indikator partisipasi (berapa banyak warga yang hadir di setiap sosialisasi). Kedua, tingkat pelaporan temuan politik uang ke posko (jumlah laporan per hari). Ketiga perubahan persepsi warga (melalui wawancara mendalam sebelum dan sesudah framing)

1. *Indikator* partisipasi, mencatat jumlah kehadiran di Sosialisasi/Pengajian/Musyawarah. Data kuantitatif harus menunjukkan rata-rata warga yang hadir di setiap pengajian anti politik uang dengan target $\geq 70\%$ warga dusun. Rata-rata partisipasi pemuda dan ibu-ibu PKK pada forum diskusi target minimal 50% kehadiran dari daftar undangan. Sumber data harus jelas seperti menggunakan daftar hadir resmi yang ditandatangani di setiap acara oleh perangkat desa. Dokumentasi foto/rekaman video yang diverifikasi oleh pemuda desa). Kemudian dapat dilihat ukuran efektivitas menunjukkan kenaikan partisipasi dari fase awal (bulan 1) ke fase lanjutan (bulan 3–4) menunjukkan kekuatan *Diagnostic* dan *Motivational*

Framing (Snow D. A., 1986).

2. *Tingkat* pelaporan temuan politik uang, jumlah laporan ke hotline/posko. Data kuantitatif harian harus menunjukkan, target awal ≥ 5 laporan per-hari selama masa kampanye (30 hari). Perbandingan antara jumlah laporan satu minggu pertama dan minggu keempat untuk melihat tren apakah framing semakin menggerakkan warga untuk melapor. Juga kualitas laporan harus menunjukkan, proporsi laporan valid $\geq 80\%$ laporan yang diverifikasi Bawaslu masuk kategori pelanggaran. Rerata waktu respon posko dari penerimaan laporan sampai pelaporan resmi ke Bawaslu dengan target ≤ 24 jam. Ukuran efektivitas harus menunjukkan tingginya rasio laporan valid menunjukkan *Prognostic Framing* atau kejelasan mekanisme pelaporan berhasil mendorong warga mengambil tindakan konkret (Snow D. A., 1986).
3. *Perubahan* persepsi warga menggunakan metodologi wawancara mendalam sebelum dan sesudah melakukan Framing desain penelitian kualitatif harus membentuk dua kelompok terpilih, warga yang semula menolerir politik uang sebut saja “sosok A” dan warga yang semula skeptis “sosok B”.

Kemudian melakukan wawancara mendalam atau *in-depth interview* dilakukan pada fase pra-framing yaitu satu minggu sebelum kampanye sosialisasi dengan menggali persepsi dasar “*Bagaimana pandangan tentang politik uang?*”. Kemudian, fase pasca- framing satu minggu setelah masa kampanye dengan menggali perubahan keyakinan “*Bagaimana sekarang pandangan tentang politik uang?*”. Instrumennya menggunakan panduan wawancara berbasis semi- struktur, mencakup pertanyaan terbuka tentang pemahaman awal tentang politik uang seperti definisi, normalisasi, motivasi menerima uang. Kedua, kesan setelah mengikuti pengajian/FGD/teater sosial apa yang berubah dalam pemikiran. Ketiga, tindakan riil yang diambil seperti melapor, mengajak tetangga, boyongan kampanye.

BAB III
Gambaran Desa Anti Politik Uang
Di Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

A. Sejarah Desa Kepuh

Sejarah Desa Kepuh seperti yang pernah disampaikan oleh sesepuh Desa yang pernah tahu sejarah dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Yaitu pada zaman dahulu kata Kepuh ada yang mengatakan diambil dari kata MARGO KEPUPUH, yang mana pada + tahun 1.800-an ada seorang bangsawan dari kartosuro yang bernama Pangeran Brojo Sekti yang entah karena sebab apa mundur dari peperangan. Ada juga Versi lain yang menerangkan bahwa kata Kepuh dipakai karena pada zaman dahulu ditemukan Pohon Kepuh, katanya Pohon itu dapat tumbuh sangat besar dan dapat menjulang tinggi (konon pada waktu itu sebagai bahan baku pembuatan kapal)

Desa Kepuh hampir seluruh masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sejak tahun 1900-an, tapi masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional. Masyarakat mulai mengenal informasi tentang ilmu pertanian pada tahun 1970-an yang pada waktu itu ada program Bimas oleh pemerintah kemudian dilanjutkan Program Insus dan Supra Insus. Program ini dirasa sangat berhasil dengan wujud meningkatnya hasil pertanian yang

puncaknya pada tahun 1980 Desa Kepuh mengalami kemakmuran dibidang pertanian. Bahkan pada tahun itu Desa Kepuh mencapai Swasembada pangan, karena pada waktu itu biaya produksi lebih murah dibanding harga jual, hal ini sangat menguntungkan petani.

Masyarakat Desa Kepuh wajib bersyukur atas apa yang ada sekarang ini, walaupun kita akui bersama bahwa Desa Kepuh masih ketinggalan dibandingkan dengan Desa-desa sekitar, tetapi masyarakat Desa Kepuh sangat tinggi keinginan untuk membangun baik dari sektor Pendidikan, pertanian, politik, perdagangan maupun sector lain.

Desa Kepuh yang terletak di Kecamatan Limpung ditetapkan sebagai salah satu desa percontohan dalam program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Batang. Penetapan ini menjadikan Desa Kepuh sebagai pionir dalam upaya pencegahan praktik politik uang di tingkat desa. Proses pemilihan desa ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang melalui audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), guna memperoleh informasi mengenai desa-desa yang terbukti tidak mengalami praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Berdasarkan hasil audiensi tersebut, terdapat tiga desa yang dijadikan sebagai model dalam program ini, yaitu Desa Kepuh di Kecamatan

Limpung, Desa Kemiri Barat di Kecamatan Subah, , serta Desa Sodong di Kecamatan Wonotunggal.

Penetapan Desa Kepuh sebagai salah satu desa anti politik uang di Kabupaten Batang berawal dari data yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), yang mencatat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Kepuh tidak menunjukkan adanya indikasi praktik politik uang. Berdasarkan data tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang kemudian melakukan audiensi dengan Dispermades untuk mengonfirmasi dan mendalami informasi mengenai desa-desa yang dinilai bersih dari politik uang. Hasil audiensi tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu untuk menetapkan Desa Kepuh sebagai salah satu pionir dalam gerakan perlawanan terhadap politik uang, terutama dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

B. Visi Dan Misi Pemerintah Desa Kepuh

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kepuh ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan di Desa Kepuh seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kepuh adalah :

“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI DAN
PENDIDIKAN YANG AGAMIS “

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi, Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kepuh, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Kepuh adalah :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan yang
Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif dan

Responsif

- b) Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif.
- c) Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda
- d) Meningkatkan taraf hidup warga miskin
- e) Membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)
- f) Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan agami.

3. Arah Pembangunan Desa

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan desa, maka selama lima tahun kedepan akan ditekankan beberapa agenda pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

- Agenda untuk mewujudkan Desa Kepuh yang Madani
- Agenda untuk mewujudkan Desa Kepuh yang Sejahtera
- Agenda untuk mewujudkan Desa Kepuh yang aman dan damai
- Agenda untuk mewujudkan Desa Kepuh yang bersumber daya manusia yang berkualitas

C. Demografi Desa Kepuh

Desa Kepuh merupakan Desa yang paling kecil di wilayah Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, yang mempunyai luas wilayah hanya + 90,1 ha. Berada di ketinggian 280 mdpl. Desa Kepuh terdiri dari 4 (empat) perdukuan yaitu : Dukuh Brajan, Dukuh Kepuh, Dukuh Tegalwareng dan Dukuh Kemiri. Sebagian wilayah merupakan persawahan yang berbukit.

Berikut Jumlah penduduk secara detail baik sesuai jenis kelamin dan juga kelompok umur :

	DUKUH				Jumlah
	Brajan	Kepuh	Tegalwareng	Kemiri	
Jumlah KK	197	92	95	73	457
Jumlah Penduduk	756	294	328	266	1.644
Laki-Laki	396	129	165	136	826
Perempuan	360	165	163	130	818

- Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

0 - <1 Tahun	18	14	11	9	52
1 - <5 Tahun	40	36	30	16	122
5 - <14 Tahun	48	47	33	21	149
14 - <20 Tahun	48	37	28	29	142

20 - <30 Tahun	65	63	61	48	237
30 - <45 Tahun	93	82	71	59	305
45 - <60 Tahun	120	104	102	98	424
>60 Tahun	72	68	52	29	221

SUMBER : Pemerintah Desa Kepuh

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat penduduk Desa Kepuh memiliki jumlah penduduk paling banyak dengan umur 45-60 Tahun yang berjumlah 424 jiwa. Sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah dengan umur 0-1 Tahun yang berjumlah 52 jiwa. Dapat dilihat juga dari tabel di atas penduduk yang paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah penduduk laki-laki.

D. Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi Desa Kepuh

Secara social, Desa Kepuh menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam bidang pendidikan. Program pemberantasan buta huruf telah berhasil dilaksanakan, sehingga desa ini dinyatakan bebas dari kategori “ Tiga Buta “ (Buta aksara, buta huruf, dan buta angka). Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan non formal, masyarakat juga mengikuti program paket B, yang terdiri dari beberapa kelompok belajar. Setelah melalui musyawarah bersama warga, dibentuk dua kelompok belajar aktif, yaitu kelompok melati 1 dan melati 2. Berdasarkan data terakhir, mayoritas penduduk Desa Kepuh masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

Sebanyak 963 orang tercatat tidak menyelesaikan pendidikan dasar (SD), dan hanya 19 orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Meskipun demikian, hal ini telah ditunjang dengan adanya sarana pendidikan dasar seperti PAUD, TK, dan SD yang tersebar di beberapa dukuh. Sayangnya, untuk jenjang SLTP hingga perguruan tinggi, belum tersedia fasilitas pendidikan di desa ini, sehingga anak-anak harus melanjutkan sekolah ke luar wilayah.

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kepuh pada umumnya masih bersifat tradisional, dengan penghidupan utama di sektor pertanian, peternakan, dan pekerjaan informal. Namun demikian, dari sisi kepemudaan, organisasi karang taruna cukup aktif dalam memberikan ruang kreatif bagi para pemuda, salah satunya melalui kegiatan rutin olahraga. Kegiatan seperti sepakbola, bulutangkis dan voli rutin diselenggarakan sebagai bentuk pembinaan generasi muda.

Dalam hal Politik di Desa Kepuh Sebelum adanya Gerakan Desa Anti Politik Uang, keterlibatan warga dalam politik cenderung pasif. Pemilu atau pilkades dianggap sebagai urusan orang-orang tertentu, dan bahkan banyak warga yang hanya ikut memilih karena dapat amplop. Namun, sejak 2019, perlahan terjadi perubahan. Saat pemilihan kepala desa, ada dorongan dari tokoh masyarakat

dan para pemuda untuk menyuarakan pemilu atau pilkades yang bersih. Mereka mulai mengajak warga untuk tidak menerima uang dari calon manapun. Kampanye dilakukan bukan secara formal, tapi lewat obrolan di warung, forum pengajian, arisan ibu-ibu, dan juga kumpulan pemuda malam hari.

Kesadaran kolektif ini berkembang menjadi gerakan bersama, meskipun awalnya tanpa nama. Setelah keberhasilan gerakan dalam mengawal pilkades tanpa politik uang, gerakan ini semakin diakui dan akhirnya pada tahun 2020 di resmikan oleh Bawaslu sebagai Desa Anti Politik Uang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Kepuh Sebagai Desa Anti Politik Uang

Dalam sejarah kemunculan gerakan, tentunya ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti dalam halnya kemunculan gerakan anti politik uang. Gerakan anti politik uang muncul karena kesadaran masyarakat terkait politik uang dapat terhapus dan pemilihan umum di Indonesia bisa bersih.

Politik uang merupakan suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut terjadi pada saat pemilihan umum legislative, eksekutif, maupun pemilihan kepala desa. Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Praktik pemberian uang atau barang dengan cara di iming-imingkan sesuatu kepada masa secara berkelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan politik yang dilakukan dalam keadaan sadar oleh pelakunya (Bawaslu, 2021).

Gerakan desa anti politik uang merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Beragam alasan mengapa kesadaran

masyarakat dapat tumbuh bersama meski secara perlahan. Misalnya, praktik jual beli suara dalam pemilu yang berdampak sangat buruk bagi pembangunan. Kontestan pemilu yang menggunakan praktik jual beli suara hanya akan beorientasi pada pengembalian modal melalui berbagai cara dalam masa jabatannya. Selain itu, masyarakat Kepuh juga memiliki kesadaran untuk menyuarkan anti politik uang. Hal itu terbukti pada pilkades 2019, dimana masyarakat Desa Kepuh menolak segala jenis bentuk politik uang.

Desa Anti politik uang Kepuh merupakan inisiasi masyarakat dalam upaya menciptakan proses demokrasi yang bersih, adil, dan jujur. Gagasan ini lahir dari keresahan warga terhadap praktik politik uang yang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Kesadaran tersebut kemudian mendorong tumbuhnya komitmen bersama untuk menolak dan melawan segala bentuk politik transaksional. Inisiatif ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun budaya demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas, dimulai dari tingkat dasar.

Kesadaran kolektif masyarakat yang terbangun melalui gerakan anti money politics mendapat perhatian dari Bawaslu Kabupaten Batang, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mencegah praktik politik uang

dalam Pemilu. Merespons inisiatif tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang menindaklanjutinya dengan mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2020. Gerakan dan deklarasi ini bertujuan membentuk aktor-aktor di tingkat desa agar berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik yang positif kepada masyarakat, khususnya terkait penolakan terhadap praktik jual-beli suara.

B. Tahapan Gerakan Sosial Anti Politik Uang

Sebelum masuk kepada pembahasan terkait pendekatan mobilisasi sumberdaya pada Desa APU di sini peneliti akan mengidentifikasi tahapan- tahapan munculnya Desa APU sebagai gerakan sosial. Dalam hal ini menggunakan pendapat Macinos terkait beberapa tahapan dalam proses gerakan sosial.

1. Tahap Kemunculan

Tinggi nya kesadaran masyarakat terhadap penolakan praktik politik uang menjadi akar munculnya gerakan Desa anti politik uang. Kemunculan gerakan sosial ini merupakan hasil dari tindakan kolektif masyarakat, bukan tindakan individu. Desa APU menjadi contoh konkret dari komunitas yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan politik uang. Aksi-aksi yang dilakukan masyarakat, seperti kegiatan diskusi bertajuk

“Kepuh Bebas Politik Uang,” mencerminkan upaya bersama dalam melakukan pendidikan politik kepada warga (berdasarkan wawancara dengan Fachrudin, Ketua Desa APU Kepuh). Selain itu, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa memiliki kapasitas untuk mempengaruhi opini publik, terutama dalam menyuarakan penolakan terhadap praktik politik uang. Hal ini dapat dilakukan melalui forum- forum keagamaan, seperti pengajian atau kegiatan serupa lainnya. Latar belakang religius masyarakat Desa Kepuh turut memperkuat upaya ini. Kehidupan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai agama serta keberadaan tiga organisasi besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menjadi modal sosial yang penting. Kepatuhan masyarakat terhadap para Kyai—yang dikenal dengan budaya “Sendiko Dawuh” atau kepatuhan kepada pemimpin agama—menjadikan edukasi politik lebih mudah diterima dan efektif dalam menyampaikan bahaya politik uang.

2. Tahap Penggabungan (Penunjukkan pemimpin)

Setelah gerakan sosial terbentuk, tahapan berikutnya adalah penunjukan pemimpin atau ketua. Kepemimpinan memiliki peran strategis dalam dinamika gerakan ini, sehingga diperlukan figur

yang memiliki latar belakang organisasi yang kuat. Di Desa APU Kepuh, Fachrudin dipilih sebagai ketua gerakan karena dinilai memiliki kapasitas dalam merumuskan kebijakan, merancang strategi, serta menjalin kemitraan dengan berbagai elemen, termasuk organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Penunjukan ini tidak dilakukan secara top-down atau karena afiliasi politik tertentu, melainkan atas dasar kredibilitas sosial, konsistensi keterlibatan, dan kapasitas Fahrudin dalam menggerakkan warga. Sebagai ketua, peran Fahrudin lebih mengarah pada pengorganisasian dan fasilitasi gerakan ketimbang pengambilan keputusan tunggal. Ia menjadi simbol keterlibatan warga dalam gerakan, namun arah dan strategi tetap dirumuskan secara deliberatif bersama elemen masyarakat. Dalam pelaksanaannya, gerakan sosial di Desa APU tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, upaya membangun sinergi antaranggota relawan memerlukan mekanisme komunikasi yang efektif serta struktur organisasi yang adaptif. Perbedaan latar belakang, motivasi, dan

pemahaman terhadap tujuan gerakan menjadi faktor yang perlu dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan disorientasi arah gerakan. Sementara itu, secara eksternal, resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik politik uang menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, strategi advokasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan pendekatan kultural menjadi penting untuk menguatkan legitimasi gerakan serta memperluas basis dukungan masyarakat.

3. Tahapan Birokratis

Seiring dengan semakin meluasnya dukungan warga dan meningkatnya intensitas kegiatan, gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) di Desa Kepuh memasuki fase birokratisasi. Pada tahap ini, struktur organisasi mulai dibentuk untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas gerakan. Kepengurusan ditetapkan secara musyawarah dengan menunjuk Fahrudin sebagai ketua gerakan, mengingat peran aktif dan pengaruh sosialnya di tengah masyarakat.

Namun, pembentukan struktur ini tidak menjadikan gerakan bersifat sentralistik. Sebaliknya, struktur yang ada lebih diarahkan untuk memastikan koordinasi kegiatan, distribusi tugas, dan dokumentasi gerakan. Fahrudin berperan sebagai

koordinator utama yang menjembatani berbagai kepentingan dan menjadi representasi gerakan dalam komunikasi eksternal, namun tidak mendominasi pengambilan keputusan.

Keputusan-keputusan strategis tetap diambil secara kolektif melalui forum musyawarah yang melibatkan relawan dari berbagai unsur masyarakat seperti karang taruna, kelompok pengajian, ibu-ibu PKK, dan tokoh agama. Struktur yang dibentuk justru menjadi wadah distribusi peran, bukan sentralisasi kekuasaan. Pola ini memungkinkan partisipasi yang luas, serta menjaga karakter gerakan yang inklusif dan berakar dari bawah (bottom-up).

Dengan demikian, fase birokratisasi dalam gerakan Desa APU bukanlah transisi menuju kekakuan struktur, melainkan sebuah langkah adaptif untuk memperkuat keberlanjutan gerakan dengan tetap menjaga semangat partisipatif dan kesetaraan di antara seluruh elemen gerakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Prasetyo selaku Ketua Karang Taruna sekaligus staf Desa APU, dijelaskan bahwa struktur organisasi gerakan ini melibatkan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing, serta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi

dalam mendukung jalannya program. Ia menyatakan, *“struktur ini dibentuk agar bisa mengatur saja, biar jelas siapa ngerjain apa. Tapi Keputusan tetap diambil secara musyawarah karena ini Gerakan warga jadi harus terbuka dan gotong royong”*

4. Tahapan Kemunduran dan Penurunan

Gerakan sosial yang berkembang di Desa APU telah dimulai sejak tahun 2019 dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Kendati pelaksanaan pemilihan umum telah usai, keberlangsungan gerakan ini tetap dijaga karena tujuan utama yang diusung belum sepenuhnya terealisasi. Fokus utama dari gerakan ini adalah meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya dalam hal memahami dampak negatif dari praktik politik uang, serta membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab dalam setiap proses pemilu yang berlangsung.

Keberlanjutan gerakan ini menunjukkan adanya komitmen jangka panjang dalam membangun budaya politik yang sehat di tingkat desa. Dalam konteks demokrasi partisipatif, gerakan semacam ini memiliki peran penting sebagai motor penggerak transformasi sosial, terutama dalam membentuk perilaku politik warga negara yang lebih kritis dan

rasional. Dengan tidak terbatas pada momentum pemilu semata, gerakan ini berupaya menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab politik sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Strategi yang diterapkan pun bersifat edukatif dan dialogis, seperti penyuluhan, diskusi kelompok, dan kampanye sosial, yang diharapkan mampu menggugah kesadaran warga untuk menolak praktik politik transaksional serta lebih aktif dalam mengawal proses demokrasi yang transparan dan berkeadilan.

Dengan demikian, gerakan sosial yang berlangsung di Desa APU tidak hanya merepresentasikan bentuk perlawanan terhadap praktik politik uang, tetapi juga menjadi contoh konkret dari upaya membangun kesadaran politik warga secara berkelanjutan. Melalui struktur organisasi yang inklusif, pelibatan masyarakat yang aktif, serta pendekatan edukatif yang konsisten, gerakan ini mampu memposisikan dirinya sebagai agen perubahan sosial di tingkat desa. Keberlangsungannya pasca pemilu menunjukkan bahwa transformasi budaya politik memerlukan proses yang tidak instan, melainkan berakar pada partisipasi warga dan komitmen kolektif dalam menciptakan tatanan demokrasi yang lebih etis, adil, dan berintegritas.

C. Dinamika Internal dan Tantangan Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh

Keberhasilan Desa Kepuh dalam membentuk Gerakan Desa Anti Politik Uang tidak terlepas dari berbagai dinamika internal yang mengiringi prosesnya. Gerakan ini bukan hadir tanpa hambatan. Justru dalam setiap tahapannya, muncul berbagai tantangan dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari lingkungan politik yang lebih luas.

1. Sikap Ambivalen Sebagian Warga

Tidak seluruh warga langsung menerima gagasan anti politik uang dengan sepenuh hati. Sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap ragu dan bahkan menganggap gerakan ini sebagai sesuatu yang tidak membawa manfaat praktis. Seorang warga yang ditemui mengungkapkan,

“ kalau nggak ada uangnya, terus kita dapat apa dari pemilu? Dulu-dulu juga begitu, ya biasa saja “.

Ungkapan ini mencerminkan bagaimana politik uang telah membentuk cara pandang sebagian pemilih, sehingga gerakan semacam ini dipandang terlalu ideal dan jauh dari kebutuhan sehari-hari. Memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah mengakrabi pemikiran warga, sehingga gerakan antikorupsi dianggap terlalu idealis dan jauh dari

kondisi harian.

Penelitian di Desa Murtigading (Bantul) menunjukkan bahwa warga menganggap politik uang sudah menjadi rutinitas pemilu, bahkan tidak sensitif terhadap bahaya” akibat sejak lama hal tersebut dianggap wajar (Noor, 2021). Kondisi ini paralel dengan sikap warga desa Kepuh, meski mengerti muatan ideal gerakan, mereka tetap mempertanyakan apa untung praktisnya.

Orientasi rasional ekonomi, di mana insentif materi langsung dilihat sebagai kompensasi atas partisipasi politik, memicu resistensi terhadap gerakan antikorupsi. Edukasi dan deklarasi saja sering kali tidak cukup menggantikan pemikiran

“saya *butuh ongkos transport atau ekstra penghasilan*”, sehingga sikap kritis perlu ditempatkan dalam konteks kebutuhan dan persepsi warga tentang *cost-benefit* dalam pemilu.

Penelitian di Desa Sardonoarjo (Sleman) menyoroti pentingnya keterlibatan elemen lokal seperti tokoh agama, LSM, serta pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan pengawasan dan kampanye moral *anti-money politics* melalui sticker, banner, dan khutbah agama (Lazuardi, 2020). Apabila gerakan di Kepuh terlalu terbatas pada

simbol tanpa pendampingan kuat dari *civil society* lokal, wajar apabila muncul sikap “apa bedanya?” dari sebagian warga.

Sikap ambivalen ini menantang kesimpulan partisipasi, apakah warga yang tetap datang ke TPS terlalu idealis atau sekadar karena terbiasa menerima kompensasi? Jika gerakan tidak mampu mengubah ekspektasi ekonomi warga, maka partisipasi ritual semacam ini bisa jadi bukan partisipasi politik sejati.

Gerakan anti-politik uang yang tidak meraih *buy-in* aktif dari warga, vertikal ideal bergerak, tapi tidak *in-merge* dengan kebutuhan lokal, berpotensi kehilangan legitimasi. Maka, klaster skeptik di masyarakat bukan hanya hambatan moral, tapi sinyal efektif bahwa desain intervensi perlu lebih realistis.

Berikut beberapa ide segar untuk memperkuat gerakan dan membumikan nilai anti-politik uang:

Tautkan imbalan non-finansial yang konkret, misalnya voucher internet gratis, penghargaan “Warga Peduli Demokrasi”, atau peluang kecil pendanaan gotong royong, sebagai alternatif kompensasi ekonomi. Dengan demikian, warga melihat nilai ekonomi non-materiil yang praktis.

Edukasi berbasis dialog komunitas: adakan forum terbuka di tempat ibadah, arisan, atau di

warung kopi, bukan hanya sosialisasi formal. Libatkan tokoh yang dihormati oleh warga ragu, seperti kepala RT, agar pesan tidak terasa asing (Wahyudi, 2023).

Pendampingan kampanye anti-politik uang selama siklus Pemilu: bukan semata menjelang pemungutan suara. Program di Salatiga (RW Ngronggo) menunjukkan bahwa keberlanjutan dan dukungan sosial capital (Bourdieu) penting agar sikap kritis tidak kolaps saat tekanan kampanye meningkat.

Rancang “Desa Blok Ragu” bahwa kelompok warga ambivalen mendapat perhatian khusus lewat kelompok diskusi, *peer-to-peer learning*, dan testimoni warga yang merasakan manfaat dari pemilu bersih. Data dan evaluasi perlu dibangun lewat observasi perilaku di TPS

Kolaborasi dengan pemutaran video kasus inspiratif (misalnya Sardono Harjo), memperlihatkan realitas di desa yang telah berhasil menjauh dari praktik politik uang, sekaligus memperlihatkan progres nyata bahwa peningkatan kepercayaan sosial, akses layanan desa lebih adil, dan tidak ada stigma bayaran nominal.

Sikap ambivalen sebagian warga Desa Kepuh

mencerminkan ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas kebutuhan ekonomi secara mikro. Penerimaan konsep anti-politik uang harus disertai imbalan praktis, lintas elemen masyarakat, serta pemantauan jangka panjang agar kesadaran tidak meredup di tengah kampanye yang agresif.

Gerakan demokrasi rakyat desa bisa bertahan bukan hanya melalui deklarasi simbolis, tapi bersama tindakan nyata: penguatan literasi politik, alternatif kompensasi, dan ikatan komunitas yang kuat. Dengan demikian, sikap skeptis bukan jadi batu sandungan, tetapi bahan refleksi yang bisa dijadikan pijakan reformasi strategi, agar demokrasi di desa bukan sekadar rutinitas, tetapi pilihan rasional dan bermartabat.

2. Kepemimpinan tidak terpusat

Gerakan di Desa Kepuh tumbuh dari berbagai unsur masyarakat-tokoh agama, pemuda karang taruna, ipnu- ippnu, ansor, ibu pkk dan lainnya. Namun, tidak adanya struktur formal yang lengkap yang mengatur sering kali menyulitkan dalam pengambilan keputusan cepat. Dalam beberapa pertemuan warga, muncul perbedaan pandangan mengenai metode sosialisasi yang paling efektif. Tokoh agama cenderung mengedepankan pendekatan

moral dan religious, sementara pemuda memilih metode kampanye kreatif seperti kampanye visual atau media social. Meski demikian semua pihak sepakat bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian dari proses belajar bersama.

Kekuatan desentralisasi hadir dalam bentuk partisipasi yang luas, ide-ide segar seperti kampanye media sosial dari pemuda dan pendekatan moral dari tokoh agama mencerminkan kreativitas sosial yang beragam, sejalan dengan temuan bahwa pluralisme tokoh desa memperkaya strategi gerakan anti-politik uang melalui diversifikasi metode dan keterlibatan masyarakat luas (Muksit & Subono, 2022). Optimisme ini memiliki potensi besar sebagai modal sosial untuk gerakan berkelanjutan.

Namun, ketiadaan struktur formal menimbulkan beberapa tantangan operasional. Pertama, pengambilan keputusan lambat bahwa kebutuhan konsensus segmen yang berbeda dapat menyebabkan penundaan respons strategis. Kedua, perbedaan prioritas moral dari tokoh agama dengan visual kreatif dari pemuda, kadang menimbulkan kebingungan warga atas pesan yang disampaikan. Ketiga, sulitnya evaluasi kinerja bahwa tanpa struktur formal, tidak ada indikator kemajuan yang

terdefinisi dengan jelas, seperti frekuensi pertemuan atau capaian target sosial.

Di Jawa Tengah mencatat bahwa program “*Desa/Kampung Pengawasan Pemilu dan Anti-Politik Uang*” dari Bawaslu banyak menghadapi hambatan struktural bahwa tidak adanya mekanisme klasterisasi peran, variabilitas teknis di masing-masing desa, serta partisipasi masyarakat yang rendah (Inti Priswari, 2023). Desa Kepuh menunjukkan pola serupa seperti semangat tinggi, namun tanpa struktur koordinasi formal, menyebabkan risiko gerakan tidak terkelola dengan baik.

Peran Komite Independen Sadar Pemilu dan struktur tim anti-politik uang terbukti penting, namun keberhasilan mereka masih kalah optimal karena perangkat desa kurang proaktif dan Bawaslu setempat minim pengawasan (Lazuardi, 2020). Situasi ini mencerminkan bahwa kekurangan struktur formal, meski gerakan berbasis komunitas, menghambat efisiensi gerakan pada tahap implementasi.

Untuk memperkuat gerakan di Desa Kepuh, pendekatan struktur hybrid dapat diterapkan, gabungan model horizontal dan formal. Pertama

dengan Tim Inti Koordinasi (TIK) Apabila tiap elemen organisasi memilih satu hingga dua wakil ke dalam TIK (aksi), ini memudahkan perencanaan dan evaluasi bersama tanpa mereduksi spontanitas gerakan. Kedua, delegasi Fungsi Spesifik seperti *Tim Moral & Religius* dengan tokoh agama fokus pada pendidikan spiritual. *Tim Kreatif & Multimedia* dengan pemuda bertanggung jawab produk kampanye visual & digital. *Tim Logistik & Sosialisasi* dengan Ibu PKK dan IPNU-IPPNU melaksanakan kampanye *door-to-door*.

Meminjam teori *social capital* Bourdieu, modal sosial di desa kuat karena keakraban komunitas, kombinasi struktur formal dan informal akan meningkatkan legitimasi gerakan. Pendekatan ini sekaligus menekan potensi fragmentasi kolektif yang terjadi karena lemah koordinasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Reaktualisasi Pendidikan Politik oleh Alina (2022) bahwa gerakan desa butuh struktur partisipatif agar edukasi politik yang sudah dilakukan punya efek transformative.

Gerakan Kepemimpinan terdesentralisasi di Desa Kepuh adalah kekuatan yang perlu ditumbuhkan, tetapi harus diimbangi oleh struktur lembaga lokal yang sederhana dan desentralisasi

fungsional. Struktur *hybrid* akan mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan jelasnya tanggung jawab, sekaligus menjaga keragaman gaya kampanye. Sistem evaluasi berjenjang memungkinkan gerakan beradaptasi, belajar dari bagian awal hingga akhir siklus pemilu. Legalitas dan identitas relawan melalui sertifikasi membantu memastikan dukungan perangkat desa dan meningkatkan partisipasi warga.

Dengan model seperti ini, gerakan anti-politik uang di Desa Kepuh tidak hanya menjadi inisiatif simbolik, tapi juga menjadi gerakan yang berkelanjutan, efektif secara sosial, dan adaptif terhadap tuntutan lokal.

3. Keterbatasan dukungan dana dan sarana

Salah satu hambatan utama yang dirasakan oleh para penggerak adalah soal pendanaan. Seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya, dan bahkan untuk mencetak spanduk atau pamfletpun merek harus petungan. Dalam satu kesempatan, relawan mengatakan “ *Kami pernah mau buat kaos kampanye anti politik uang,tapi akhirnya gagal karena keterbatasan dana*” kondisi ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat cukup tinggi, tetapi tidak selalu diimbangi dengan

ketersediaan sarana. Menurut Lukman et al. (2025) dalam studi mereka tentang literasi politik, kendala pendanaan berbicara pada dua hal. Pertama minimnya anggaran formal yang bisa dialokasikan untuk pengadaan alat kampanye seperti spanduk, pamflet, dan kaos. Kedua, ketergantungan pada kontribusi sukarela warga, yang rentan terhadap fluktuasi motivasi dan kemampuan ekonomi mereka .

Situasi ini paralel dengan temuan Amaliyah & Suteja (2023), yang menunjukkan bahwa di daerah dengan literasi politik rendah, gerakan cenderung stagnan ketika tidak ada dukungan material yang konkret.

Keterbatasan dana dan sarana bukan sekadar masalah logistik, tapi juga berdampak pada citra Gerakan bahwa materi kampanye seadanya menyebabkan gerakan terlihat amatir, berisiko kehilangan persepsi profesionalitas. Jangkauan komunikasi terbatas bahwa tanpa media cetak atau digital yang memadai, pesan anti-politik uang tidak maksimal merambah masyarakat seluruh desa. Motivasi relawan menurun bahwa kegagalan pengadaan infrastruktur visual (kaos, baliho) menciptakan kekecewaan, bahkan kelelahan

organisasional.

Lukman et al. (2025) menekankan bahwa keberlanjutan gerakan bergantung pada kombinasi literasi politik dengan dukungan dana terstruktur, bukan hanya spontanitas sukarelawan saja. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pendanaan eksternal terbukti efektif meningkatkan kapasitas operasional dan kredibilitas gerakan.

4. Rekomendasi Pendanaan Inovatif dan Kolaboratif

Agar gerakan anti-politik uang di Kepuh tidak sebatas simbol semata, berikut beberapa model pendanaan yang strategis dengan skema iuran sukarela transparan, misalnya Rp 5.000 per KK/bulan, dengan laporan keuangan terbuka. Dana *mikro-grant* dari CSR lokal dengan ajukan proposal sosialisasi anti-politik di desa melalui BUMDes atau Lembaga profesional seperti Sawit Mandiri. Partnership dengan kampus atau literasi NGO bahwa kerjasama untuk pendanaan kegiatan literasi politik dan materi edukasi.

Ajukan proposal kepada kepala desa agar kegiatan kampanye bersih dianggap sebagai program pemberdayaan warga. Integrasikan dengan kegiatan PKK atau Karang Taruna agar dana dialokasikan via dana desa sebagai bagian dari point pemberdayaan

masyarakat. Buat kampanye berbasis media sosial untuk menggalang dana kecil dari diaspora atau alumni desa. Tawarkan *reward* simboli seperti kaos, sertifikat relawan untuk donor kecil sebagai insentif non-finansial. Pindahkan materi promosi ke platform digital (WhatsApp, Instagram, Telegram) agar tidak perlu cetak fisik. Kolaborasi dengan *content creator* lokal (misal mahasiswa) untuk materi visual kreatif secara gratis atau barter jasa.

Pendanaan yang cukup tidak hanya memungkinkan gerakan berjalan, tetapi juga menunjukkan profesionalitas organisasi gerakan, yang penting untuk efektivitas dan legitimasi. Mendorong sistem *participatory budgeting* lokal, di mana warga belajar realitas alokasi dana publik. Menciptakan ruang evaluasi dan transparansi yang meningkatkan literasi politik sesuai rekomendasi (Lukman et al 2025) .

Keterbatasan dana dan sarana menimbulkan celah antara ambisi ideologis dan implementasi nyata gerakan anti-politik uang di Desa Kepuh. Untuk menutup celah ini, perlu strategi dengan merumuskan skema pendanaan *hybrid* yang jelas, transparan, dan melibatkan warga. Mencari sumber sukarela dari CSR, APBDes, NGO, dan

crowdfunding digital. Memprioritaskan metode komunikasi digital sebagai solusi efisiensi. Mengelola anggaran dan komunikasi publik sebagai bagian dari pelajaran literasi politik nyata.

Dengan itu, gerakan tidak sekadar simbol moral, melainkan gerakan yang berdampak nyata, mandiri secara finansial, dan berkelanjutan, sebuah gerakan demokrasi rakyat desa yang benar-benar menjadi ruang perubahan.

5. Tekanan sosial dari pihak-pihak tertentu

Gerakan ini juga sempat menghadapi tekanan dari beberapa tokoh yang selama ini memiliki kedekatan dengan elite politik local. Meski tidak terjadi dalam bentuk penolakan terbuka, namun ada kecenderungan untuk membatasi ruang gerak relawan. Salah seorang relawan pernah diperingatkan agar tidak terlalu vocal karena bisa merusak hubungan baik dengan tokoh desa. Ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap gerakan anti politik uang tidak hanya datang dari masyarakat awam tetapi juga dari struktur kekuasaan.

Gerakan anti-politik uang di Desa Kepuh tidak semata mendapat tantangan dari masyarakat awam, tetapi juga mengalami tekanan halus dari kalangan elite lokal yang merasa posisi mereka terancam.

Meskipun tidak ada penolakan terbuka, narasi tekanan muncul dalam bentuk peringatan emosional kepada relawan.

“Jangan terlalu vokal, nanti rusak hubungan dengan tokoh desa.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa resistensi terhadap gerakan bukan hanya datang dari basis, tetapi juga dari struktur kekuasaan lokal, yang menggunakan mekanisme sosial ketimbang administratif untuk membatasi ruang gerak.

Literatur politik lokal menegaskan bahwa elite desa selama era demokratisasi tetap mengandalkan jaringan patronase lintas Tingkat, baik administratif maupun komunal untuk menjaga pengaruh mereka (Riwanto & Achmad, 2021). Dalam konteks Desa Kepuh, tokoh desa atau elite lokal bisa menekan moral relawan melalui imbauan informal, menciptakan konformitas sosial yang melekat.

Model tekanan yang digunakan bukan formal, melainkan melalui pranata budaya desa, yaitu norma sopan santun yang menghindari konflik terbuka dengan tokoh. Ancaman semu terhadap hubungan sosial, artinya relawan bisa dikucilkan atau kehilangan akses ke jaringan lokal jika terlalu vokal. Mengaburkan legitimasi gerakan, di mana elite

mengklaim gerakan “asing” dan tak paham seluk-beluk desa, menciptakan stigma “mengganggu keharmonisan”.

Peredaman vokal relawan bahwa relawan yang berhati-hati tidak menggunakan media sosial atau kampanye publik. Resistensi laten bahwa mereka mungkin setuju secara pribadi namun menarik diri dari aksi publik agar tidak berbenturan. Risiko fragmentasi gerakan bahwa jika beberapa relawan mundur karena tekanan, kelompok bisa kehilangan momentum koordinasi.

Tanpa strategi antisipatif, tekanan ini bisa dipersepsi sebagai efektif menonaktifkan gerakan, bahkan tanpa intervensi formal. Untuk menghadapi tantangan ini, berikut beberapa strategi inovatif berbasis literatur gerakan sosial dan politik desa. Teori modal sosial menunjukkan bahwa masyarakat dengan jaringan eksternal (*bridging social capital*) lebih resisten terhadap tekanan internal. Libatkan organisasi kampus, LSM, atau Bawaslu yang memiliki "legitimasi eksternal". Format kampanye terbuka dengan saksi eksternal agar tekanan lokal tidak efektif.

Pendekatan ini diuraikan dalam studi Nglanggeran, bahwa tokoh agama, birokrat lokal,

dan NGO bisa membentuk aliansi untuk melindungi gerakan dan memberi legitimasi moral. Buat deklarasi publik bersama di ruang terbuka (masjid, balai desa) yang mendukung gerakan. Undang tokoh kabupaten dalam kegiatan, menciptakan medan tekanan balik terhadap tokoh lokal.

Menggabungkan strategi kognitif dan afektif: penggunaan narasi persaudaraan desa, film dokumenter singkat, dan training storytelling anti-politik uang. Mengakumulasi simpati tanpa ekspose langsung yg memicu elite. Membentuk identitas kolektif yang kontra terhadap tekanan sosial. Pelatihan relawan tentang “cara menyampaikan kritik” agar tidak tampak mengancam, dengan teknik komunikasi persuasive, bisa menurunkan sensitivitas tokoh tanpa mengurangi daya gerakan

Tekanan sosial dari elite lokal bukan ancaman kecil, ia mampu melumpuhkan gerakan secara halus dan efektif. Namun, dengan memanfaatkan modal sosial eksternal, pendekatan *soft- power*, pendidikan persuasi, dan aliansi strategis, Desa Kepuh memiliki opsi cerdas untuk melawan tekanan ini. Gerakan demokrasi anti-politik uang sejati adalah gerakan yang mampu menjaga keberlanjutan identitas moral sekaligus fleksibel dalam menghadapi kekuatan

sosial tak berwajahnya.

6. Adaptasi gerakan melalui budaya local

Di tengah berbagai tantangan tersebut, gerakan ini mampu beradaptasi. Salah satunya adalah dengan menyisipkan pesan-pesan anti politik uang dalam kegiatan keagamaan dan budaya, seperti pengajian, pertunjukkan rebana atau arisan warga. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tidak konfrontatif dan terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain itu keberadaan tokoh-tokoh desa yang dipercaya masyarakat sangat membantu dalam menjaga semangat gerakan. Gerakan anti-politik uang di Desa Kepuh mampu beradaptasi dan tumbuh dari budaya lokal yang kuat, mengintegrasikan pesan-pesan demokrasi dalam praktik keagamaan dan sosial budaya masyarakat. Misalnya, relawan menyisipkan narasi anti-politik uang saat pengajian, pertunjukan rebana, atau arisan ibu-ibu. Pendekatan ini efektif karena, tidak konfrontatif, pesan disampaikan dalam suasana akrab, bukan forum politik formal. bercekupan dengan kehidupan sehari-hari, hadir dalam momen sosial yang sudah melekat dalam keseharian warga.

Pengajian dan tabligh akbar Tokoh agama

membacakan ayat moral dan menekankan kewajiban memilih dengan nurani, menciptakan pesan antikorupsi dari perspektif spiritual, efektif mengubah mindset karena dibingkai sebagai kewajiban agama. Pertunjukan rebana dan kesenian lokal, selipan lirik lagu dan dialog ringkas dalam pertunjukan rebana merangkul narasi "*bersih dari membeli suara*", membangun emotional engagement sekaligus menanamkan kesadaran kolektif. Arisan dan forum ibu-ibu PKK Diskusi santai di ruang ibu-ibu PKK, tempat informal yang memungkinkan penyampaian pesan secara *peer-to-peer*, membuka ruang konsultasi dan ungkap kekhawatiran ekonomi tanpa menimbulkan stigma moral. Dialog pemuda dalam media sosial lokal Pemuda Karang Taruna memanfaatkan WhatsApp group dan Instagram dengan membagikan info harian tentang kasus *money politics* nasional sebagai refleksi lokal, membangun awareness dengan format ringan dan mudah dicerna.

Menurut Alina (2022), gerakan yang menggunakan budaya lokal berhasil membentuk *cultural resonance*—menghubungkan ide gerakan dengan identitas masyarakat, meningkatkan daya nalar partisipatif. Tentu ini terjadi karena relawan

menginternalisasi pesan ke dalam ritual dan simbol desa.

Jadwalkan event rutin seperti pengajian dan rebana yang menghadirkan narasi anti politik uang, menghadirkan kisah sukses desa yang bersih dan berkah. Toolkit pesan budaya Buat paket materi sederhana, syair, poster, kartu doa yang bisa diunduh dan distribusikan relawan dalam majelis pengajian atau arisan. Pelatihan tokoh budaya atau agama

Sediakan modul ringkas yang memadukan ajaran agama dan undang-undang Pilkades untuk para kiai atau ustadz agar pesan moral dikontrol nilai agama & hukum secara bersamaan. Cakap pesan melalui kolaborasi sastrawan lokal Libatkan penulis lokal atau seniman tradisional untuk membuat cerpen, drama pendek atau puisi bertema antikorupsi, menyisipkan dalam pementasan desa.

Monitoring dampak sosial-budaya Gunakan metode Pengabdian Masyarakat (PAR) untuk melacak perubahan sikap dan perilaku warga, seperti suksesnya pelaporan *money politics* oleh warga kepada panitia pemilu lokal (Arsyad, 2022).

Adaptasi budaya lokal dalam merancang strategi edukatif menjadikan gerakan desa Kepuh terlihat organik dan efektif. Integrasi pesan politik ke dalam

pengajian, rebana, arisan, serta pemanfaatan tokoh dipercaya membentuk pendekatan yang tidak hanya moral, tapi juga emosional. Struktur ini memperkuat modal sosial dan identitas kolektif, menjadikan gerakan bukan sekadar narasi luar, tapi bagian hidup desa sehari-hari.

Dengan memperkuat model ini, dengan toolkit praktis, pelatihan, dan monitoring, Desa Kepuh bisa menjadi contoh keberhasilan adaptasi gerakan demokrasi berbasis budaya lokal yang bermartabat dan tahan banting terhadap praktik politik uang.

BAB V

GERAKAN DAN STRATEGI

A. Gerakan Desa Apu dalam Memobilisasi Sumberdaya

Gerakan Anti Politik Uang di Desa Kepuh merupakan manifesting dari kesadaran bersama masyarakat desa terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi desa. Keberhasilan gerakan ini tidak terlepas dari kemampuan penggerak/pemimpin dalam mengorganisir dan memobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam kerangka teori mobilisasi sumber daya (Resource Mobilization Theory), gerakan social dianggap mampu bertahan dan efektif apabila dapat mengakses, mengelola, serta mengalokasikan berbagai jenis sumber daya baik yang bersifat material maupun non material.

Oleh karena itu gerakan sosial mempunyai tugas utama, yaitu memobilisasi pendukung dan mengorganisasi sumber daya agar dapat melakukan perubahan sosial demi terwujudnya suatu tujuan gerakan tersebut. Sumber daya tersebut terdiri dari akses mobilisasi, dukungan simpatisan, loyalitas gerakan, keahlian yang dimiliki maupun finansial.

1. Pemimpin dan kepemimpinan

Dalam konteks dinamika gerakan sosial, peran

pemimpin sangat krusial, terutama dalam proses mobilisasi massa. Pemimpin bertindak sebagai aktor kunci yang mengarahkan dan mengoordinasikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik yang bersifat internal seperti solidaritas kelompok dan ideologi, maupun eksternal seperti dukungan finansial, media, dan jaringan sosial.

Kemampuan pemimpin dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya ini sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah gerakan sosial. Lebih jauh, kepemimpinan dalam organisasi gerakan sosial tidak hanya terkait dengan fungsi koordinatif, tetapi juga membawa beban tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anggota biasa. Pemimpin sering kali menjadi simbol dari gerakan itu sendiri, sehingga harus siap menghadapi berbagai risiko, termasuk tekanan politik, sosial, bahkan ancaman keamanan. Meskipun demikian, posisi pemimpin juga memberi peluang untuk memperoleh berbagai keuntungan apabila gerakan mencapai tujuannya.

Maka dengan demikian, kepemimpinan dalam gerakan sosial merupakan posisi strategis yang tidak hanya menuntut kemampuan mengorganisasi dan menginspirasi, tetapi juga kesanggupan menanggung

konsekuensi atas dinamika gerakan yang mereka pimpin.

Menurut Morris dan Staggenborg dalam Snow, Soule, & Kriesi, para pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial (Snow, Soule, & Kriesi, 2004).

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan. Arnold dan Feldman menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi (influence process), dimana dalam kepemimpinan melibatkan upaya pemimpin (leader) untuk mempengaruhi perilaku satu atau beberapa orang lainnya (Arnold & Feldman, 1986).

Fachrudin merupakan salah satu figur yang berperan dalam inisiasi pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh, Kabupaten Batang. Inisiatif tersebut mulai dikembangkan pada saat

pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada bulan Mei 2019. Gerakan ini lahir sebagai respon atas meningkatnya praktik politik uang yang dianggap merusak prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Dalam kapasitasnya sebagai penggerak, Selamat tidak hanya berperan sebagai pelopor, tetapi juga aktif mengajak individu-individu yang memiliki visi serupa untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam gerakan anti politik uang seperti ini menunjukkan pentingnya peran elite lokal dalam membentuk kesadaran politik warga, sebagaimana dijelaskan oleh Huntington dan Nelson (1990) bahwa elite lokal memiliki kekuatan strategis dalam memengaruhi dinamika politik akar rumput. Dari sudut pandang sosiologis, inisiatif ini juga mencerminkan adanya modal sosial yang kuat dalam masyarakat desa, di mana jaringan kepercayaan dan norma bersama digunakan sebagai alat untuk membangun gerakan kolektif (Huntington, 1990).

Gerakan yang diprakarsai oleh Fachrudin dapat dikaji sebagai bentuk ppenolakan kolektif terhadap praktik politik uang yang secara signifikan

mengancam kualitas demokrasi di tingkat desa. Pendekatan partisipatif yang diusung oleh gerakan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penolakan terhadap politik uang, tetapi juga berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pelibatan aktif warga, gerakan ini berupaya mengubah posisi masyarakat dari objek pasif menjadi subjek yang memiliki peran sentral dalam proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan praktik koruptif dalam pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan kapasitas politik masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab. Upaya ini selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan keterlibatan warga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Organisasi Gerakan Sosial

Organisasi adalah sumber daya yang paling penting, dibandingkan dengan jenis-jenis sumber daya yang lain. Menurut Klandermans, organisasi adalah alat untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya, berdasarkan hasil studinya tentang struktur peranan, posisi, dan norma di antara partisipan gerakan sosial,

berkesimpulan bahwa karakteristik penting dalam suatu gerakan sosial adalah organisasi (Della Porta & Diani, 2006).

Istilah organisasi secara konseptual memiliki setidaknya tiga makna. Pertama, organisasi dapat dipahami sebagai sebuah sistem sosial yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks ini, relasi antar individu maupun kelompok di dalam organisasi membentuk ekspektasi sosial terhadap perilaku masing-masing anggota. Ekspektasi tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk peran- peran fungsional, di mana sebagian individu menjalankan fungsi kepemimpinan, sementara yang lain mengambil posisi sebagai pengikut. Kedua, organisasi juga dimaknai sebagai suatu entitas yang memiliki diferensiasi peran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota dalam organisasi memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, dan dalam banyak kasus, individu dituntut untuk mampu menjalankan lebih dari satu peran secara simultan. Diferensiasi peran ini diperlukan guna menciptakan efisiensi serta efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ketiga, organisasi merupakan wadah sosial yang

terbentuk atas dasar kesepakatan bersama untuk mematuhi seperangkat norma dan aturan internal. Keanggotaan dalam organisasi bersifat sukarela, namun mengandung konsekuensi moral dan fungsional, yaitu kepatuhan terhadap nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku di dalam struktur organisasi tersebut.

Dalam upaya memperkuat gerakan penolakan terhadap praktik politik uang, Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) tidak hanya membentuk struktur organisasi di tingkat desa, tetapi juga menginisiasi pembentukan jaringan relawan di setiap Rukun Warga (RW). Kehadiran relawan pada tingkat lokal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan gerakan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika kontestasi politik di tingkat desa maupun daerah.

Gerakan sosial pada dasarnya memerlukan pengelolaan sumber daya yang terorganisir dan strategis. Keberhasilan suatu gerakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan ideal yang ingin dicapai, melainkan juga oleh kapasitas organisasi dalam menghimpun, mengarahkan, dan mempertahankan keterlibatan individu di dalamnya. Jumlah

partisipan, bentuk kontribusi yang diberikan, sejauh mana mereka rela berkorban, serta kemampuan mereka untuk tetap konsisten dalam menghadapi tantangan menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial pada dasarnya merupakan suatu bentuk kolektivitas yang melibatkan sekumpulan orang yang bersatu untuk mendorong atau menentang perubahan sosial. Dalam konteks ini, gerakan sosial bukan hanya sekadar upaya bersama, tetapi juga mencerminkan komitmen kolektif terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut.

Untuk mencapai tujuannya, gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) memerlukan mobilisasi massa yang efektif. Sebagai bagian dari strategi ini, gerakan Desa APU melakukan rekrutmen relawan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di Desa Kepuh. Relawan-relawan tersebut berperan aktif dalam menyosialisasikan serta mengkampanyekan nilai-nilai anti politik uang kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini penting guna memastikan

bahwa pesan gerakan dapat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat desa secara menyeluruh.

Seperti yang disampaikan oleh Fachrudin, partisipasi aktif dari masyarakat, baik individu maupun kelompok, menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu gerakan sosial. Oleh karena itu, mobilisasi partisipasi melalui relawan menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat eksistensi dan efektivitas gerakan sosial, terutama dalam mengkampanyekan perubahan sosial yang positif seperti penolakan terhadap praktik politik uang.

Terdapat pula kelompok serta lembaga masyarakat di Desa Kepuhyang juga ikut mendukung gerakan anti politik uang. Kelompok dan Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah :

- a. Karang Taruna
- b. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- c. Kelompok Tani
- d. Ormas seperti NU, Muhammadiyah

Adanya dukungan dari kelompok dan Lembaga masyarakat tentunya membuat gerakan Desa anti money politic semakin kuat.

Salah satu hambatan yang signifikan bagi

gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) adalah keterbatasan dalam sumber daya finansial. Sebagai gerakan yang aktif dalam mobilisasi massa, Desa APU dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk berbagai aktivitas organisasi.

Keterbatasan dana ini mencakup biaya-biaya operasional yang penting, seperti pengadaan logistik, alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan poster, serta biaya lainnya yang diperlukan untuk menyosialisasikan dan mempromosikan gerakan anti politik uang kepada masyarakat. Tanpa dukungan finansial yang memadai, upaya gerakan dalam memperluas jangkauan dan efektivitas kampanye bisa terhambat, mengingat pentingnya media visual dan material lainnya untuk menarik perhatian dan menyebarkan pesan gerakan ke berbagai lapisan masyarakat.

Pendanaan merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan gerakan sosial, terutama yang berbasis komunitas seperti gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh. Sumber dana gerakan ini bersifat mandiri dan bersumber dari kontribusi sukarela para relawan serta donasi dari masyarakat dan tokoh setempat tanpa adanya paksaan. Kondisi ini mencerminkan adanya modal sosial yang kuat

berupa solidaritas dan kepercayaan antar anggota komunitas, yang menjadi pendorong utama keberlangsungan gerakan.

Lebih lanjut, ketergantungan gerakan pada sumber dana internal tanpa dukungan institusional atau lembaga eksternal menunjukkan bahwa gerakan ini beroperasi secara otonom dan mengandalkan partisipasi aktif warga sebagai modal utama. Dari perspektif teori mobilisasi sumber daya, hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang ada secara efektif agar gerakan dapat berjalan berkelanjutan meskipun menghadapi keterbatasan finansial. Pendekatan semacam ini juga menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) di kalangan anggota, yang pada gilirannya memperkuat komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan program- program gerakan.

Namun demikian, ketergantungan pada sumber daya internal juga menimbulkan tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi skala dan intensitas kegiatan. Oleh karena itu, pengembangan strategi diversifikasi sumber pendanaan dan upaya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas gerakan dalam jangka

panjang.

4. Peluang dan kapasitas Masyarakat

Dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) aktif melakukan sosialisasi terkait maraknya praktik politik uang dalam setiap ajang kontestasi politik yang berpotensi merusak demokrasi.

Fachrudin selaku ketua gerakan menjelaskan bahwa para relawan secara aktif bergerak untuk menyosialisasikan pentingnya penolakan terhadap praktik politik uang dan jual beli suara kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya ini tidak berjalan tanpa hambatan. Gerakan tersebut menghadapi berbagai bentuk tantangan, terutama dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima tujuan gerakan. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mencurigai bahwa gerakan ini memiliki kepentingan tersembunyi, dan sebagian lainnya memandang praktik politik uang sebagai sesuatu yang lumrah dalam proses demokrasi. Selain itu, tuduhan bahwa gerakan ini ditunggangi oleh kepentingan partai politik tertentu juga menjadi tantangan serius yang mengganggu kelancaran sosialisasi. Meskipun demikian, gerakan ini tetap berkomitmen untuk terus memberikan

edukasi politik kepada masyarakat. Mereka berupaya menanamkan kesadaran akan bahaya politik uang serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

Dalam upaya mensosialisasikan gerakan anti politik uang, gerakan Desa APU terjun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan pesan penolakan terhadap praktik politik uang dalam pemilu. Selain itu, gerakan ini tidak hanya fokus pada sosialisasi dan kampanye penolakan terhadap politik uang, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di kalangan masyarakat.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa strategi rekrutmen yang diterapkan oleh gerakan sosial di Desa APU Kepuh mengedepankan prinsip keterbukaan dan pemanfaatan jaringan sosial yang telah terbentuk secara alami dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan gerakan untuk mengidentifikasi dan melibatkan individu yang memiliki kompetensi serta motivasi tinggi dalam mendukung tujuan bersama. Organisasi gerakan memanfaatkan berbagai sumber daya lokal, mulai dari keterlibatan relawan yang aktif, pemanfaatan jaringan komunikasi yang tersebar di tingkat desa,

hingga pendanaan yang diperoleh secara mandiri melalui sumbangan sukarela dari masyarakat serta tokoh-tokoh pendukung.

Model pengelolaan sumber daya ini menegaskan pentingnya modal sosial sebagai pilar utama dalam keberlangsungan gerakan sosial di tingkat komunitas. Keterbatasan dukungan institusional tidak menjadi hambatan signifikan karena gerakan mampu menggalang solidaritas dan partisipasi aktif dari warga secara konsisten. Dengan demikian, gerakan sosial di Desa APU Kepuh menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mendorong perubahan sosial tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya material, melainkan juga pada kemampuan membangun hubungan sosial yang kuat dan komitmen kolektif masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi strategi efektif yang dapat diadaptasi untuk memperkuat gerakan sosial lain yang berorientasi pada perubahan sosial.

B. Strategi Framing Gerakan Anti Politik Uang Desa Kepuh

Salah satu kekuatan utama gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh terletak pada kemampuannya membangun dan menyebarkan kerangka

makna (Framing) yang menggugah kesadaran moral dan politik warga. Framing dalam konteks ini bukan sekedar komunikasi, tetapi proses aktif membentuk cara berfikir dan merasa masyarakat terhadap politik uang.

Berdasarkan kerangka teori Snow dan Benford (1998), Framing dalam gerakan social dibagi menjadi tiga dimensi utama: diagnostic framing (Definisi masalah), prognostic framing (solusi dan strategi), dan motivational framing (alasan untuk bertindak). Ketiga nya berfungsi sebagai fondasi dalam proses tranformasi kesadaran warga desa Kepuh.

1. Diagnostic Framing : Politik Uang sebagai ancaman moral dan social

Langkah pertama gerakan ini adalah membingkai ulang politik uang sebagai masalah kolektif yang berbahaya, bukan sekedar praktik yang lumrah yang bisa dimaklumi. Jika sebelumnya menerima uang amplop dianggap sebagai hak atau rejeki musiman, gerakan ini mengubah persepsi tersebut menjadi tindakan yang menciderai keadilan social dan masa depan.

Framing ini diperkuat melalui narasi berbasis nilai-nilai keagamaan dan lokalitas:

“kalau pemimpin kita terpilih karena uang, maka nanti yang dia layani bukan rakyat, tapi yang punya

modal. “

Kampanye ini menempatkan politik uang sebagai racun demokrasi desa yang menghancurkan kepercayaan public dan melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas. Pendekatan ini sangat efektif karena menyentuh aspek moral warga, bukan hanya rasionalitas politik.

2. Prognostic Framing : Solusi melalui komunitas dan keteladanan Setelah memetakan masalah, gerakan ini menyodorkan solusi berbasis kolektivitas. Alih-alih menunggu aturan dari atas, warga desa didorong untuk membuat pakta integritas social, yaitu kesepakatan informal untuk tidak menerima atau menawarkan uang dalam setiap momen pemilu.

Beberapa strategi kongkret yang dikembangkan : Sosialisasi dari rumah ke rumah oleh relawan muda, kajian rutin bertema politik bersih di kegiatan-kegiatan desa, poster dan spanduk yang menampilkan pesan tentang tolak politik uang.

Uniknya solusi tidak datang dari struktur negara atau lembaga formal, tetapi dari komunitas itu sendiri. Ini menunjukkan kekuatan prognostic framing : gerakan tidak hanya menyalahkan,tapi menawarkan arah perubahan.

3. Motivational framing : seruan moral dan symbol

perlawanan Framing terakhir adalah memobilisasi kesediaan bertindak. Dalam hal ini, gerakan Desa Kepuh menggunakan pendekatan emosional dan simbolik. Kata-kata seperti “masa depan“, “dosa“, “warisan nilai“ menjadi jargon yang membangkitkan dorongan bertindak.

Contoh kalimat “ Kalau hari ini kita tergoda dengan uang 100 ribu, maka kita jual harga diri desa ini selama 6 tahun “

Symbol-simbol seperti tikar musyawarah dan bendera putih (sebagai lambing netralitas) juga digunakan untuk menghidupkan semangat kolektif. Dalam hal ini, budaya local dijadikan sebagai medium komunikasi politik yang otentik dan relevan bagi warga desa.

Berdasarkan konteks di atas, *diagnostic framing* berperan dalam merumuskan “apa” yang sesungguhnya menjadi masalah. Seperti wacana “*politik uang meracuni demokrasi desa*” menjadi satu kesatuan narasi yang mengidentifikasi akar kerusakan bukan sekadar persoalan siapa yang menang, tetapi bahwa seluruh proses Pilkades dianggap telah kehilangan esensi kejujuran dan keadilan. Munculnya kesadaran ini diperkuat oleh konsistensi pelabelan dengan sebutan “Racun

Demokrasi”. Narasi “*politik uang adalah racun*” dikumandangkan tokoh penggerak dalam beberapa rapat balai desa dan forum pengajian. Mereka menyamakan praktik jual-beli suara dengan serangan mematikan yang jika dibiarkan, akan menimbulkan retaknya relasi antarkeluarga layaknya virus bermacam-macam (Snow D. A., 1986).

Penggunaan *Frame Bridging* dapat menyatukan berbagai kelompok warga, meskipun warga desa mulai dari pemuda karang taruna, kader PKK, hingga para petani dan buruh tani memiliki latar belakang ekonomi dan kepentingan berbeda, semua merasakan kegelisahan serupa bahwa uang telah dijadikan alat tawar dalam memilih pemimpin, bukan kualitas visi ataupun kemampuan manajerial calon kepala desa. Gerakan Anti Politik Uang kemudian menjembatani (*bridging*) kekhawatiran berbagai kelompok ini, sehingga tidak hanya menjadi gerakan kelompok tertentu saja, melainkan gerakan desa yang menyeluruh.

Proses formulasi dan legitimasi gerakan, setelah teridentifikasi persepsi permasalahan umum, langkah berikutnya adalah menyusun rekomendasi solusi konkret dan mencari legitimasi moral maupun kelembagaan agar gagasan “bersih dari politik uang”

bisa diterima. Di sinilah peran *prognostic framing* dan *motivational framing* berperan. *Prognostic Framing* atau bagaimana jalan keluar yang diupayakan oleh tokoh penggerak merumuskan rangkaian langkah teknis seperti, deklarasi Desa Anti Politik Uang yang merupakan dokumen tertulis yang diteken oleh jajaran perangkat desa, tokoh adat, pemuda, dan perwakilan agama. Isi deklarasi menegaskan tiga poin utama, pertama “*Menolak segala bentuk pemberian uang atau barang yang bermuatan imbalan suara.*” Kedua, “*menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah mufakat, dan amanah.*” Ketiga “*bersedia menjadi pengawas sukarela selama masa kampanye dan hari-H pencoblosan.*”

Penyusunan SOP pengawasan pilkades dapat mengacu pada format sederhana seperti siapa yang menjadi pemantau atau satgas desa, mekanisme pelaporan melalui posko dan *hotline via WhatsApp*, hingga tata cara validasi laporan. Keberadaan SOP memudahkan masyarakat umum termasuk warga yang awam teknologi untuk ikut memantau indikasi pemberian politik uang.

Sosialisasi berjenjang dengan penggalangan dialog rutin di tiap dusun, rapat RT/RW, bahkan

pengajian khusus anti politik uang setiap akhir pekan. Bahasa yang dipakai menekankan bahaya nyata *“Ada dana desa yang seharusnya untuk pembangunan irigasi, justru digunakan untuk modal politik tak berkepentingan.”*

Motivational Framing atau alasan moral untuk bertindak, Agar warga bukan hanya memahami “apa” dan “bagaimana,” tetapi juga terdorong “mengapa” mereka harus berkontribusi, gerakan menekankan nilai keagamaan seperti Khutbah Jumat dan tausiyah mingguan memuat analogi bahwa memberi suap pada pemilih sama *halnya* menjerumuskan diri ke dalam dosa suap-menyuap, sebagaimana dilarang dalam ajaran Islam. Rangkaian testimoni dari korban politik uang juga penting, misalnya warga yang sebelumnya memilih karena uang, lalu kecewa ketika janjinya tak ditepati membuat pesan emosional menjadi lebih kuat. Nilai kebersamaan dan keadilan sosial seperti warga desa diingatkan bahwa jika kepala desa terpilih karena politik uang, maka pembangunan jalan rabat beton, bantuan bibit pertanian, atau program vaksin hewan ternak bisa diprioritaskan hanya untuk simpatisannya saja. Ini akan menimbulkan ketidakadilan distribusi sumber daya

di tingkat RT/RW. Dengan *framing* bahwa desa yang baik adalah desa yang adil dan merata, motivasi bersama untuk melawan politik uang turut menguat.

Identitas kolektif Desa Kepuh dengan membentuk narasi “*Desa Kepuh sebagai contoh desa yang bersih*” dibangun oleh para pemuda, mereka mencantumkan slogan “*Kepuh Berintegritas*” pada baliho kecil dan spanduk di perempatan jalan desa. Kalangan remaja dan mahasiswa yang pulang kampung juga merasa bangga ikut mengecat poster, yang mana hal ini semakin memperkuat rasa nasionalisme desa atau *sense of collective identity*.

Bersinergi dengan kerangka *frame transformation*, wacana semula bahwa politik desa adalah urusan elit pemerintahan dapat berangsur-angsur bergeser menjadi pemikiran bahwa setiap warga, dari tingkat RT hingga lembaga adat, adalah pemilik kedaulatan desa. Proses transformasi ini menuntun warga awam untuk merasa aktif dan berhak melaporkan indikasi politik uang, bukan pasif menunggu perubahan dari atas.

C. Peran Bawaslu Dalam Gerakan Anti Politik Uang Desa Kepuh

Meskipun inisiatif awal Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh muncul secara organik dari kesadaran

kolektif warga, kehadiran Bawaslu memiliki peran penting dalam memperkuat dan memperluas dampak gerakan ini. Dalam konteks teori Mobilisasi sumber daya, Bawaslu dapat dikategorikan sebagai actor eksternal yang berkontribusi dalam menyediakan legitimasi structural, sumber daya institusional, serta memperkuat gerakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dalam menghadapi praktik politik uang. Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Bawaslu Kabupaten Batang untuk ikut serta dalam membantu upaya dalam mencegah politik uang dengan melalui desa anti politik uang yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tentunya dengan ikut dalam pengawasan partisipatif yang juga melibatkan masyarakat secara independent untuk ikut mengawasi proses pemilihan umum.

Deklarasi resmi Desa Kepuh sebagai Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu pada tahun 2020 menjadi titik penting dalam penguatan gerakan. Bawaslu menyediakan sarana kampanye seperti spanduk, forum edukasi, serta membentuk jaringan koordinasi antara desa dengan

perangkat pengawasan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Bentuk dukungan ini menambah sumber daya material, kultural, dan moral yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan gerakan.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dalam berjalannya program desa anti politik uang yaitu;

1. Membuat forum grup discussion (FGD) dengan stakeholder dan masyarakat tentang kesadaran dalam menolak politik uang
2. Pengembangan sumber literasi
3. Penyusunan materi untuk sosialisasi

4. Pemanfaatan media social untuk menolak politik uang
5. Menggerakkan aktivitas warga untuk memproduksi konten anti politik uang
6. Komitmen warga menjadi actor dalam menolak politik uang.

Kemudian upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga program desa anti politik uang adalah dengan melakukan sosialisasi di sela- sela kegiatan pertemuan desa, rutinan desa, hingga kegiatan pengajian. Terlebih lagi Desa Kepuh memang sudah memulai menjalankan desa tanpa politik uang sebelum dideklarasikannya program itu, jadi untuk menjalankan program desa anti politik uang mereka sudah tidak terlalu kesulitan untuk melewati setiap proses-prosesnya.

Dari sudut pandang framing, Bawaslu juga membantu dalam memperluas resonansi gerakan melalui frame amplification. Bahaya politik uang tidak hanya dibingkai sebagai masalah etika local, tetapi juga sebagai pelanggaran hokum yang menciderai demokrasi. Hal ini memperkuat narasi gerakan yang sebelumnya lebih berbasis moral dan agama, menjadi lebih komprehensif dengan dimensi hukum dan konstitusional.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keterlibatan

Bawaslu tidak bersifat dominan. Posisi mereka lebih sebagai fasilitator dan penguat narasi, bukan sebagai pengendali gerakan. Dalam perspektif teori mobilisasi sumber daya, ini menunjukkan bahwa gerakan social yang lahir dari bawah (bottom-up) tetap dapat menjalin kemitraan strategis dengan actor negara tanpa kehilangan karakter otonomnya.

Dengan demikian, peran Bawaslu dalam konteks ini merupakan bentuk dukungan structural yang memperluas legitimasi dan keberlanjutan gerakan, namun tidak menghilangkan esensi utama gerakan sebagai ekspresi dari kesadaran dan partisipasi warga desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyajikan hasil akhir dari penelitian mengenai gerakan sosial Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di Desa Kepuh sebagai bentuk respons kolektif masyarakat terhadap dampak negatif politik uang dalam proses politik desa. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab munculnya gerakan tersebut serta bagaimana mobilisasi sumber daya dilakukan untuk menggerakkan dan mempertahankan gerakan sosial ini. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut.

Pertama, terbentuknya gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, merupakan hasil dari kesadaran bersama masyarakat yang merasa jenuh dan prihatin terhadap praktik politik uang yang selama ini marak dan mengancam kualitas demokrasi di desa tersebut. Kesadaran kolektif ini memicu inisiatif warga untuk membentuk sebuah gerakan sosial yang bertujuan melakukan pencegahan dan pemberantasan politik uang, yang kemudian dikenal dengan sebutan Desa APU.

Kedua, dalam menjalankan aktivitasnya, gerakan

Desa APU memobilisasi berbagai sumber daya dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat serta beragam organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian serupa. Pendekatan ini memungkinkan gerakan untuk memperluas jaringan dan memperkuat pesan kampanye anti politik uang yang disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam proses mobilisasi ini, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kelancaran dan keberhasilan gerakan. Faktor pendorong utama adalah optimalisasi jejaring komunikasi yang dimiliki oleh para aktor gerakan, yang memudahkan koordinasi serta penyebaran informasi secara efektif. Sebaliknya, terdapat pula faktor penghambat yang menjadi tantangan signifikan, yaitu keterbatasan sumber daya finansial yang memengaruhi skala kegiatan serta urang optimalnya kolaborasi antara Desa APU dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi dan dukungan lebih intensif dari institusi pengawas pemilu untuk memperkuat daya gerak gerakan sosial tersebut.

Selain itu, keberhasilan gerakan ini juga tidak lepas dari strategi framing yang dijalankan oleh para aktor gerakan. Melalui pendekatan diagnostic framing, politik uang dibingkai sebagai ancaman moral dan sosial yang merusak demokrasi desa. Prognostic framing

menghadirkan solusi berbasis komunitas, seperti deklarasi anti politik uang dan pengawasan berbasis warga. Sementara itu, motivational framing digunakan untuk membangkitkan dorongan moral warga melalui simbol, narasi keagamaan, dan analogi kehidupan sehari-hari. Strategi ini memperkuat resonansi pesan gerakan karena dibingkai sesuai dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kejujuran, dan ukhuwah. Dengan demikian, framing berperan penting dalam mentransformasikan persepsi masyarakat dan menciptakan legitimasi kultural terhadap gerakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam menginisiasi serta mempertahankan gerakan sosial yang bertujuan memperbaiki proses demokrasi di tingkat desa. Namun demikian, tantangan dalam hal pendanaan dan kemitraan institusional perlu menjadi perhatian serius agar gerakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian mengenai gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan gerakan ini:

1. Peningkatan Kapasitas Relawan dan Pengurus Gerakan

Perlu adanya pelatihan dan pembekalan secara berkala bagi para relawan dan pengurus Desa APU agar mereka lebih memahami strategi kampanye, metode edukasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan politik uang. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat.

2. Penguatan Kemitraan dengan Bawaslu dan Pemerintah Desa

Agar gerakan dapat berjalan lebih efektif, disarankan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antara Desa APU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten serta pemerintah desa. Dukungan dari institusi-institusi ini sangat penting dalam menyediakan pendampingan teknis, pengawasan, serta fasilitasi sumber daya yang dibutuhkan.

3. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Mengingat keterbatasan sumber daya finansial menjadi salah satu hambatan utama, gerakan Desa APU perlu mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggalangan dana yang lebih terorganisir, serta

menjalin kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau pihak swasta yang memiliki komitmen serupa.

4. Penguatan Jaringan Komunikasi dan Sosialisasi Desa APU hendaknya terus mengembangkan dan memperluas jejaring komunikasi, baik secara formal maupun informal, guna menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi juga dapat dimaksimalkan sebagai sarana edukasi dan kampanye anti politik uang secara efektif.
5. Penguatan **Strategi Framing dalam Kampanye Anti Politik Uang.**

Disarankan agar strategi framing yang telah terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terus dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat narasi yang relevan secara moral, kultural, dan religius yang menyentuh nilai-nilai lokal masyarakat desa. Pelatihan bagi relawan atau tokoh kunci mengenai teknik framing sosial juga penting dilakukan agar mereka dapat lebih sistematis dalam menyampaikan pesan gerakan yang menggugah kesadaran dan menginspirasi partisipasi aktif masyarakat.

6. Evaluasi **dan** Monitoring Berkala

Disarankan agar gerakan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin untuk menilai pencapaian serta mengidentifikasi tantangan yang muncul. Hal ini akan membantu dalam merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh dapat semakin solid dan mampu berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan proses demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (2005). *Metode penelitian : suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agatha, R. D. (2025). Perbandingan Implementasi Program Desa Anti Politik Uang Bawaslu (Studi Komparasi Desa Tutup dan Desa Mojorembum Kabupaten Blora). *Journa Of Politic and Goverment Studies*, 14(2).
- Agus Riwanto, A. S. (2021). MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.3, Juli 2021.
- Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang . *POLITICOS : Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Andi Haris, ,. A. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin journal of sociology*.
- Andriansyah, A. (2021, 01 10). LSI : Masih ada masyarakat yang di tawari uang di pilkada 2020. *Voa Indonesia*.
- Arnold, H. J., & & Feldman, D. C. (1986). *Organization Behavior*. Singapore: Hill Book Co.
- Arsyad, N. (2022). Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Journal Of Public Administration*, 1(1).
- Aspinall, E. &. (2019). *Democracry for sale : Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bawaslu. (2021, 9 21). *Bawaslu Batang sebarakan virus anti politik uang di AdinusO*. Retrieved 7 24, 2023, from Batang.Bawaslu.go.id: <https://batang.bawaslu.go.id/bawaslu-batang-sebarakan-virus-anti-politik- uang-d-adinusO>
- Benford, R. D. (2000). Framing Processes and Social Movements:

- An Overview and Assessment. *Annual Review Sociology* , 611-639.
- Benu, G. S. (2021). GERAKAN SOSIAL POLITIK MASYARAKAT DALAM PENOLAKAN PERTAMBANGAN GALIAN C DI KALI NOEMUTI (Studi Perlawanan Sosial Politik Di Desa NaiolaKecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara) . *Nusa Cendana*.
- Bungin, B. (2015). *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Charty, Z. M. (1997). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design , Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2006). Social Movements an Introduction. *Malde : BlackWell Publishing*.
- Edelman, M. (2001). Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics. *Annual Review of Anthropology*, 285-317.
- Edward Aspinall, M. S. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Farasonalia, F. (2020, 12 11). Bawaslu temukan 23 Kasus Dugaan Politik Uang saat pilkada 2020 di Jawa tengah . *Kompas* .
- Halili. (2009). PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura. *Jurnal Humaniora*, 14(9), 99-112.
- Huntington, N. (1990). No easy choice: Political participation in developing countries. . *Harvard University Press*.
- Jenkins, J. C. (1983). Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. *Annual Review Of Sociology*, 527-553.
- Kenlies Era Rosalina Marsudi, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan

- Politik melalui pemebentukan Kampung Anti Money Politic. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Kompas, M. (2019, Agustus 29). *Survei LIPI : Masyarakat memandang politik uang bagian dari pemilu, tidak dilarang*. Retrieved 7 24, 2023, from Media nasional Kompas.Com:
<https://kompas.com/nasional/read/2019/08/29/05213291/surevi-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>
- Lazuardi, F. (2020). *Dinamika Gerakan Desa Anti Politik Uang (Studi kasus : Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman)*.
- Lina Ulfa Fitriani, L. W. (2018). *(Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat . Univeritas Mataram .*
- Macionis, J. J. (1999). *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Manalu, D. (2007). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik (Kasus perlawanan masyarakat batak Vs PT. Inti indorayon utama)*. *Jurnal Populasi*, hal 32-33.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McAdam, M. J. (1996). *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. . Cambridge University Press*.
- Moleong, L. (2005). *Metode Peneltian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya*.
- Muhtadi, B. (2013). *Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID dan Patron-Klien"*. *Jurnal Penelitian Politik, Vol 10 No 1*.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Muksit, A., & Subono, N. I. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. Interbational Journal Of Demos, 4(2)*.

- Noor, H. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Desa Murtigading Dalam Mendukung Gerakan Desa Anti Politik Uang Sebagai Pencegahan Kegiatan Politik Uang Pada Pemilu 2019. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Nursyidah Arsyad, A. A. (2020). Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai).
- OPP, K. D. (2009). *Theories of political protest and social movements*. London: Routledge.
- Pranata, N. Y. (2019). Strategi mencegah Money Politic melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus pada gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul). 1-2.
- Purwaningsih, T., Pahlevi, M. E., Amrullohi, A. A., Khatami, M. I., & Nuryanti, S. (2023). Penguatan Demokrasi Dari Desa di Masa Pandemi COVID-19 : Problematika Pengembangan Program Desa Anti Politik Uang. *Jurnal Politik Profetik*, 11(2).
- Riwanto, A., & Achmad, A. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah- Masalah Hukum*, 50(3).
- saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Seidman, S. C. (1990). Manufacturing Militance: Workers' Movements in Brazil and South Africa. *University Of California Press*.
- Snow, D. A. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. *American Sociological Review*, 464-581.
- Snow, D. A. (1988). Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. *International Social Movement Research*. 199-203.
- Snow, D. A., Soule, S. A., & Kriesi, H. (2004). *The Blackwell Companion to Social Movement*. Oxford :

Blackwell Publishing.

- Suharko. (2006). Gerakan sosial baru di Indonesia repertoar gerakan petani. *Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial Vol 10 n0 1*.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing Malang.
- Wahyudi, H. (2023, Desember Senin). *Pendidikan Politik Masyarakat Lawan Politik Uang*. Retrieved from Times Indonesia.

Lampiran 1 (Dokumentasi)



Lampiran 1 (Dokumentasi)



Lampiran 2 (Daftar Pertanyaan)

Daftar Perntanyaan Wawancara untuk penelitian Gerakan desa anti politik uang:

1. Bisa ceritakan tentang peran anda didesa ini?
2. Apa yang ada pahami tentang politik uang?
3. Apakah praktik politik uang pernah terjadi di desa anda?
4. Bagaimana anda mengenal gerakan desa anti politik uang?
5. Apa tujuan utama dari gerakan ini menurut anda?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap gerakan ini?
7. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan gerakan ini?
8. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
9. Sejauh mana gerakan ini berhasil menurut pengalaman anda?
10. Apa harapan anda kedepan terkait desa anti politik uang ini?
11. Apakah ada pesan atau saran yang ingin disampaikan untuk mendukung gerakan ini?

RIWAYAT HIDUP

A. Identittas Diri

1. Nama Lengkap : Syahrul Umam
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Batang, 12 Oktober 2000
3. Alamat rumah : Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang RT 02 RW 01
4. No. Hp :081548938236
5. Email : sajaumam41@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PERTIWI BAWANG Tahun 2005
2. MI AL SYAIRIYAH Tahun 2012
3. MTS AL SYAIRIYAH Tahun 2015
4. MAN KENDAL Tahun 2018

Semarang, 02 Juni 2025

Yang menyatakan,



Syahrul Uman